

**SKRIPSI**

**PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, PENCATATAN ADMINISTRATIF,  
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN LINGKUNGAN BIROKRASI  
TERHADAP TINGKAT PENYERAPAN ANGGARAN PADA ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH (OPD) KABUPATEN SIAK**



**OLEH :**

**IRIANTO  
NPM. 165310889**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2022**

**Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau**



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan  
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Irianto  
NPM : 165310889  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi S1  
Judul Skripsi : Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pencatatan Administratif, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Birokrasi Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Siak

**Disahkan Oleh:**

**PEMBIMBING**

  
Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

**Mengetahui:**

**DEKAN**

**KETUA PRODI**

  
Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

  
Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**FAKULTAS EKONOMI**

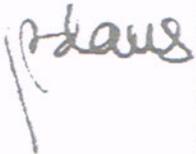
JalanKaharudinNasution No. 113 PerhentianMarpoyan  
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

**NOTULENSI SEMINAR PROPOSAL**

NAMA : IRIANTO  
NPM : 165310889  
HARI/TANGGAL : 03-MARET-2022  
JUDUL PENELITIAN : PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, PENCATATAN ADMINISTRATIF, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN LINGKUNGAN BIROKRASI TERHADAP TINGKAT PENYERAPAN ANGGARAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) KABUPATEN SIAK

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Diketahui dan disetujui oleh Arsip Miltik :

Saran Tim Penguji	Pemeriksaan	Keterangan	Paraf
<b>FIRDAUS AR, DR, SE., M.Si., AK., CA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Oke</li><li>• Oke</li><li>• Oke</li><li>• Oke</li></ul>	Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki	Sudah cukup baik	
<b>BURHANUDIN, SE. M.Si</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Perbaiki LBM</li><li>• Oke</li><li>• Oke</li></ul>	Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki	Hal 4 Sudah cukup baik	

Mengetahui



**Dr. Siska. SE., M.Si., Ak., CA**  
Ketua Prodi Akuntansi S1



Diketahui



**Dr. Siska. SE., M.Si., Ak., CA**  
Pembimbing 1

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**FAKULTAS EKONOMI**

JalanKaharudinNasution No. 113 PerhentianMarpoyan  
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

**NOTULENSI SEMINAR HASIL**

NAMA : IRIANTO  
NPM : 165310889  
HARI/TANGGAL : 03-MARET-2022  
JUDUL PENELITIAN : PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, PENCATATAN ADMINISTRATIF, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN LINGKUNGAN BIROKRASI TERHADAP TINGKAT PENYERAPAN ANGGARAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) KABUPATEN SIAK

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Saran Tim Penguji	Pemeriksaan	Keterangan	Paraf
<b>BURHANUDIN, SE. M.Si</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Abstrak</li><li>• Tambah teori</li><li>• Uji statistik</li></ul>	Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki  Sudah diperbaiki	Daftar isi Hal 14  Hal 66,67,68	
<b>HALIMAHTUSSAKDIAH. SE., M.AK., AK., CA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Teknik penulisan perbaiki</li><li>• Kutipan diambil tahun diatas 2012</li><li>• Bahasa asing dimiringkan</li><li>• Tabel nya dirapikan</li><li>• Pada penjelasan koefisien di perbaiki</li><li>• Judul perbaiki, simpulan dan saran</li></ul>	Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki Sudah diperbaiki  Sudah diperbaiki	Hal 4 Hal 14 Hal 42  ujikoefisien independen	

Mengetahui



Dr. Siska. SE., M.Si., Ak., CA  
Ketua Prodi Akuntansi S1



Diketahui



Dr. Siska. SE., M.Si., Ak., CA  
Pembimbing 1



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284  
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: [www.uir.ac.id](http://www.uir.ac.id) Email: [info@uir.ac.id](mailto:info@uir.ac.id)

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR**  
**SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

NPM : 165310889  
 Nama Mahasiswa : IRIANTO  
 Dosen Pembimbing : 1. SISKASE, M.Si., Ak 2.  
 Program Studi : AKUNTANSI  
 Judul Tugas Akhir : PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, PENCATATAN ADMINISTRATIF, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN LINGKUNGAN BIROKRASI TERHADAP TINGKAT PENYERAPAN ANGGARAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) KABUPATEN SIAK  
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : THE EFFECT OF BUDGET PLANNING, ADMINISTRATIVE RECORDING, HUMAN RESOURCES COMPETENCY AND BUREAUCRACY ENVIRONMENT ON THE LEVEL OF BUDGET ABSORPTION IN SIAK DISTRICT REGIONAL DEVICE ORGANIZATIONS (OPD)  
 Lembar Ke : .....

Pepustakaan Universitas Islam Riau

No	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
10-03-2021	BIMBINGAN PROPOSAL BAB 1		- PERBAIKAN JUDUL - PERBAIKAN DAPTAH ISI - PERBAIKAN LBM	<i>[Signature]</i>
01-04-2021	BAB 2		- PERBAIKAN KATA YANG TERTINGGAL HURUP NYA - TAMBAH TEORI	<i>[Signature]</i>
23-04-2021	BAB 3		TAMBAHKAN TEORI DAN VARIABEL NYA DI PERBAIKI	<i>[Signature]</i>
06-05-2021	ACC PROPOSAL			<i>[Signature]</i>
23-06-2021	SEMINAR PROPOSAL			
02-10-2021	BIMBINGAN SKRIPSI BAB 4 & BAB 5		- PERBAIKAN HASIL PENELITIAN ,UJI HEPOTENSISI ,DAN VARIABEL NYA DI TAMBAHKAN LAGI	<i>[Signature]</i>
02-11-2021	ACC SKRIPSI			<i>[Signature]</i>
09-03-2022	SEMINAR HASIL DAN UJIAN ORAL			

Pekanbaru, 23 maret 2022  
 Wakil Dekan I/ Ketua Departemen/ Ketua Prodi

*[Signature]*  
 SISKASE, M.Si., Ak )  
 FAK. EKONOMI DAN BISNIS



- Catatan :
1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
  2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
  3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
  4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/ Ketua prodi
  5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
  6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpovan Pekanbaru Telp 647647

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau No: 223/KPTS/FE-UIR/2022, Tanggal 08 Maret 2022, Maka pada Hari Rabu 09 Maret 2022 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau pada Program Studi **Akuntansi S1** Tahun Akademis 2021/2022

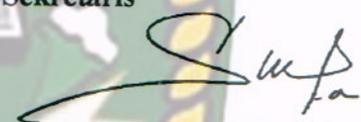
- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Nama                 | : Irianto  |
| 2. NPM                  | : 165310889  |
| 3. Program Studi        | : Akuntansi S1   |
| 4. Judul skripsi        | : Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pencatatan Administratif, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Birokrasi Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Siak. |
| 5. Tanggal ujian        | : 09 Maret 2022  |
| 6. Waktu ujian          | : 60 menit.  |
| 7. Tempat ujian         | : Ruang sidang meja hijau FEB UIR  |
| 8. Lulus Yudicium/Nilai | : <b>Lulus (B) 67,25</b>   |
| 9. Keterangan lain      | : Aman dan lancar.   |

PANITIA UJIAN

Ketua

  
**Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA**  
Wakil Dekan Bidang Akademis

Sekretaris

  
**Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA**  
Ketua Prodi Akuntansi S1

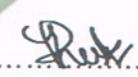
Dosen penguji :

1. Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA
2. H. Burhanuddin, SE., M.Si
3. Halimahtussakdiah, SE., M.Ak., Ak., CA

  
.....  
  
.....  
  
.....

Notulen

1. Lintang Nur Agya, SE., M.Acc., Ak

  
.....

Pekanbaru, 09 Maret 2022

Mengetahui  
Dekan,

  
**Dona Sundari, SE., MM., CRBC**

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 223 / Kpts/FE-UIR/2022  
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau dilak sanakan ujian skripsi /oral komprehensve sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji.  
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen  
3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.  
6. SK. Pimpinan YLPI Daerah Riau Nomor: 006/Skep/YLPI/II/1976 Tentang Peraturan Dasar Universitas Islam Riau.  
7. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :  
a. Nomor : 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Eko. Pembangun  
b. Nomor : 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Manajemen  
c. Nomor : 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1  
d. Nomor : 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

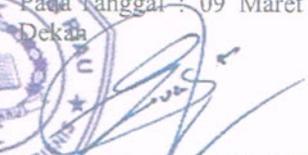
**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:
- N a m a : Irianto  
N P M : 165310889  
Program Studi : Akuntansi S1  
Judul skripsi : Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pencatatan Adminitratif, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Birokrasi Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Siak.
2. Penguji ujian skripsi/oral komprehensve maahsiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang Diuji	Jabatan
1	Dr. Hj. Siska, SE., M.Si, Ak., CA	Lektor, C/c	Materi	Ketua
2	H. Burhanuddin, SE., M.Si	Lektor, C/c	Sistematika	Sekretaris
3	Halimahtussakdiah, SE...,M.Ak.CA	Assisten Ahli, C/b	Methodologi	Anggota
4			Penyajian	Anggota
5			Bahasa	Anggota
6	Lintang Nur Agia,SE., M.Acc.,Ak	Asisten Ahli C/b	-	Notulen
7			-	Saksi II
8			-	Notulen

3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian dilaksanakan.  
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 09 Maret 2022  
Dekan

  
Dr. Eva Sundari, SE., MM., CRBC

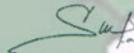
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

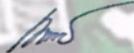
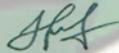
**BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI**

Nama : Irianto  
NPM : 165310889  
Jurusan : Akuntansi / S1  
Judul Skripsi : Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pencatatan Administratif, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Birokrasi Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Siak.  
Hari/Tanggal : Rabu 09 Maret 2022  
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA		

Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	H. Burhanuddin, SE., M.Si		
2	Halimahtussakdiah, SE., M.Ak., Ak., CA		

Hasil Seminar : \*)

1. Lulus ( Total Nilai )
2. Lulus dengan perbaikan ( Total Nilai 67,5 )
3. Tidak Lulus ( Total Nilai )

Mengetahui  
An.Dekan

  
Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA  
Wakil Dekan I



Pekanbaru, 09 Maret 2022  
Ketua Prodi

  
Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

\*) Coret yang tidak perlu

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

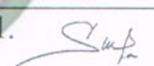
BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Irianto  
NPM : 165310889  
Judul Proposal : Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pencatatan Administratif, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Birokrasi Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Pada OPD Kabupaten Siak.  
Pembimbing : 1. Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA  
Hari/Tanggal Seminar : Kamis 24 Juni 2021

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

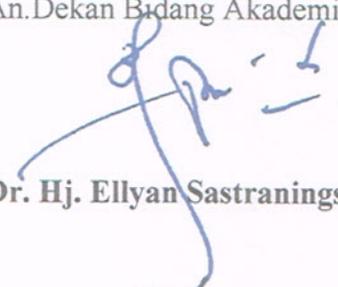
1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan \*)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali \*)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki \*)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki \*)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas \*)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang \*)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas \*)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas \*)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas \*)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas \*)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas \*)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian \*)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat \*)
14. Kesimpulan tim seminar : Perlu/tidak perlu diseminarkan kembali \*)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA	Ketua	1. 
2.	Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA	Anggota	2. 
3.	Masnur, SE., M.Si	Anggota	3. 

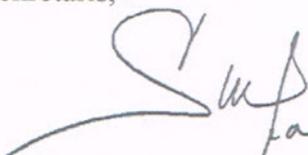
\*Coret yang tidak perlu

Mengetahui  
An. Dekan Bidang Akademis

  
Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si



Pekanbaru, 24 Juni 2021  
Sekretaris,

  
Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor: 1031/Kpts/FE-UIR/2020**  
**TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA S1**  
*Bismillahirrohmanirrohim*  
**DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

Menimbang : 1. Surat penetapan Ketua Jurusan / Program Studi Akuntansi tanggal 28 April 2020 tentang penunjukan Dosen Pembimbing skripsi mahasiswa.  
 2. Bahwa dalam membantu mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga mendapat hasil yang baik perlu ditunjuk Dosen Pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap Mahasiswa tersebut

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003  
 2. Undang-Undang RI Nomor:14 Tahun 2005  
 3. Undang-Undang RI Nomor:12 Tahun 2012  
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 4 Tahun 2014  
 5. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI :  
 a. Nomor : 192/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Eko. Pembangun  
 b. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Manajemen  
 c. Nomor : 197/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Akuntansi S1  
 d. Nomor : 001/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/IV/2014 Tentang Akreditasi D.3 Akuntansi  
 6. Surat Keputusan YLPI Daerah Riau  
 a. Nomor: 66/Skep/YLPI/RI/1987  
 b. Nomor: 10/Skep/YLPI/IV/1987  
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013  
 8. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Riau tanggal 10 Maret 1987  
 a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan: 1. Mengangkat Saudara-saudara yang tersebut namanya di bawah ini sebagai Pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu:

No	N a m a	Jabatan/Golongan	Keterangan
1	Hj. Siska, SE., M.Si, Ak, CA	Lektor, C/c	Pembimbing

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah:  
 N a m a : Irianto  
 N P M : 165510389  
 Jurusan/Jenjang Pendid. : Akuntansi S1  
 Judul Skripsi : Analisa Penerapan Pengakuan Pendapatan Dan Beban Pada Pt.Bhumireksa Nusasejati Rotan Semelur Estate

3. Tugas pembimbing adalah berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor: 52/UIR/Kpts/1989 tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa di lingkungan Universitas islam Riau.  
 4. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya memperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal  
 5. Kepada pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.  
 6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini segera akan ditinjau kembali.  
 Kutipan: Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan menurut semestinya.

Ditetapkan di: Pekanbaru  
 Pada Tanggal: 31 Agustus 2020  
  
**Dr. Hirdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA**

Tembusan : Disampaikan pada:  
 1. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau  
 2. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
 Dokumen ini adalah Arsip Milik :



## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : IRIANTO  
NPM : 165310889  
Program Studi : Akuntansi S1  
Judul Skripsi : PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, PENCATATAN ADMINISTRATIF, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN LINGKUNGAN BIROKRASI TERHADAP TINGKAT PENYERAPAN ANGGARAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) KABUPATEN SIAK

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi Kurang dari 30 % yaitu 27 % pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*, Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 19 Maret 2022

Ketua Program Studi Akuntansi



Siska SE., M.Si., Ak., CA



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

الجامعة الإسلامية البريوتية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674681 Email : info@uir.ac.id Website : www.eco.uir.ac.id

### PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : IRIANTO  
NPM : 165310889  
Program Studi : Akuntansi S1  
Topik : Akuntansi Keuangan  
Pembimbing : Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA.

Pekanbaru, 00 0000  
Menyetujui,



Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA.  
NPK. 98 0602 270

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Irianto

Npm : 165310889

Program studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Universitas : Universita Islam Riau

Judul : **PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, PENCATATAN ADMINISTRATIF, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN LINGKUNGAN BIROKRASI TERHADAP TINGKAT PENYERAPAN ANGGARAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) KABUPATEN SIAK**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi atau karya ilmiah ini merupakan karya saya sendiri kecuali ringkasan dan kutipan ( baik langsung maupun tidak langsung ) saya mengambil dari berbagai sumber dan disebutkan nama nya. Secara ilmiah saya bertanggung jawab atas kebenaran data dan fakta skripsi ini .

Pekanbaru, 20 Maret 2022

Yang bertanda tangan



NPM 165310889

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pencatatan Administratif, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Lingkungan Birokrasi Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Siak”** yang disusun sebagai syarat Akademis dalam penyelesaian Program Studi Akuntansi (S1), Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Riau. Saya sebagai penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa dukungan, bimbingan, bantuan, serta do'a dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi. Pada kesempatan ini saya sebagai penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau beserta Bapak Wakil Rektor I, II, III Universitas Islam Riau.
2. Ibu Dr. Eva Sundari, SE.,MM.,CRBC selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah berjasa memimpin dalam fakultas ini sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di fakultas sini.
3. Ibu Dr. Hj. Siska, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau dan dosen pembimbing yang telah berkenan membimbing dan mengarahkan penulis selama menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang selama ini telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.

5. Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang selama ini memberikan kemudahan administrasi selama masa perkuliahan.
6. Kedua ayahanda dan ibunda yang tercinta tidak henti-hentinya selalu memberikan do'a, perlindungan, dan kasih sayang serta perhatian yang tak terhingga, serta kakak yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk para teman sahabat terbaikku yang pernah penulis miliki selama masa perkuliahan serta pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Saya sebagai penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, kritik dan saran sangat saya harapkan untuk kesempurnaan penelitian ini dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Pekanbaru, Maret 2022  
Penulis,

IRIANTO

## ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh perencanaan anggaran, pencatatan administratif, kompetensi sumber daya manusia dan lingkungan birokrasi terhadap tingkat penyerapan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Siak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Objek penelitian adalah perencanaan anggaran, pencatatan administrative, kompetensi sumber daya manusia dan lingkungan birokrasi terhadap tingkat penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Siak. Sampel penelitian adalah pegawai bagian keuangan pada masing-masing organisasi perangkat daerah yang diwakili sebanyak 81 orang. Penentuan sampel menggunakan *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah Regresi Linear Berganda dengan bantuan SPSS windows ver 20. dengan menggunakan jenis data yaitu data primer dari pengisian kuesioner penelitian. Hasil penelitian menemukan bahwa perencanaan anggaran, pencatatan administratif, kompetensi sumber daya manusia dan lingkungan birokrasi secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Siak.

Kata Kunci: Perencanaan Anggaran, Pencatatan Administratif, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Lingkungan Birokrasi, Tingkat Penyerapan Anggaran

## ABSTRACT

*The purpose of the study was to determine the effect of budget planning, administrative records, human resource competence and the bureaucratic environment on the level of budget absorption in regional organization Siak Regency. This research is a descriptive quantitative research. The object of research is budget planning, administrative records, human resource competence and the bureaucratic environment on the level of budget absorption in the Siak Regency regional organization. The research sample is the finance department employee in each regional organization which is represented by 81 people. Determination of the sample using purposive sampling. The analysis technique used is Multiple Linear Regression with the help of SPSS windows ver 20. By using the type of data, namely primary data from filling out research questionnaires. The results of the study found that budget planning, administrative records, human resource competence and the bureaucratic environment partially and simultaneously had a significant effect on the level of budget absorption in regional organization Siak Regency.*

*Keywords: Budget Planning, Administrative Recording, Human Resource Competence, Bureaucratic Environment, Budget Absorption Rate*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>ABSTRACT</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	vii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II. TELAHAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS</b> .....	10
2.1 Telaah Pustaka .....	10
2.1.1 Teori <i>Stakeholder</i> .....	10
2.1.2 Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ).....	11
2.1.3 Anggaran.....	11
2.1.4 Pencatatan Administratif .....	22
2.1.5 Kompetensi Sumber Daya Manusia .....	24
2.1.6 Lingkungan Birokrasi .....	26
2.2 Penelitian Terdahulu .....	28
2.3 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian.....	29
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b> .....	31
3.1 Desain Penelitian.....	31
3.2 Objek Penelitian .....	31
3.3 Operasional Variabel Penelitian.....	31
3.4 Populasi dan Sampel .....	33
3.5 Jenis dan Sumber Data .....	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	35
3.7 Analisis Data .....	35
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	41
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	41
4.2 Hasil Penelitian .....	44
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian .....	63

<b>BAB V. SIMPULAN DAN SARAN</b> .....	66
5.1 Simpulan .....	66
5.2 Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	70
<b>LAMPIRAN</b> .....	73
<b>BIODATA PENULIS</b> .....	81



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	28
Tabel 3.1	Jumlah Populasi Penelitian.....	33
Tabel 4.1	Daftar Hasil Kuesioner.....	44
Tabel 4.2	Karakteristik Responden .....	45
Tabel 4.3	Statistik Deskriptif.....	46
Tabel 4.4	Uji Validitas Variabel Perencanaan Anggaran ( $X_1$ ).....	48
Tabel 4.5	Uji Validitas Variabel Pencatatan Administratif ( $X_2$ ).....	48
Tabel 4.6	Uji Validitas Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia ( $X_3$ ).....	49
Tabel 4.7	Uji Validitas Variabel Lingkungan Birokrasi ( $X_4$ ) .....	49
Tabel 4.8	Uji Validitas Variabel Tingkat Penyerapan Anggaran (Y).....	50
Tabel 4.9	Hasil Uji Reliabilitas .....	51
Tabel 4.10	Hasil Uji Normalitas.....	54
Tabel 4.11	Hasil Uji Multikolinieritas .....	55
Tabel 4.12	Hasil Uji Autokorelasi.....	56
Tabel 4.13	Hasil Uji Parsial (Uji t).....	58
Tabel 4.14	Hasil Perhitungan Uji F.....	62
Tabel 4.15	Koefisien Determinasi.....	62

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Grafik Histogram.....	52
Gambar 4.2	<i>P Normal Probability Plot</i> .....	53
Gambar 4.3	Grafik <i>Scatterplot</i> .....	57



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Penganggaran merupakan suatu unsur atau bagian penting dalam sebuah perencanaan yang dibuat suatu entitas melalui tahap formulasi strategis terhadap alokasi sumber daya sebagai upaya pencapaian tujuan yang tergambar dalam visi dan misi suatu organisasi atau perusahaan. Anggaran dapat digunakan sebagai alat perencanaan biaya dan pendapatan, komunikasi, motivasi, serta sebagai alat pengendali bagi atasan (*superior*) kepada bawahannya (*subordinates*).

Menurut Munandar 2014:1, “Anggaran yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang”. Menurut Nafarin 2016:11, mendefinisikan bahwa “Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa”.

Anggaran merupakan komponen penting dalam sebuah organisasi, baik organisasi sektor swasta maupun organisasi sektor publik. Menurut Hansen dan Mowen (2016:1), Setiap entitas pencari laba ataupun nirlaba bisa mendapatkan manfaat dari perencanaan dan pengendalian yang diberikan oleh anggaran. Perencanaan dan pengendalian merupakan dua hal yang saling berhubungan.

Anggaran belanja merupakan hal yang sangat penting dalam keberlangsungan sebuah negara. Dan anggaran belanja digunakan sebagai alat kebijakan di bidang fiskal disamping fungsinya untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah. Belanja pemerintah digunakan sebagai pendorong perekonomian secara agregat disaat perekonomian sedang lesu dan sektor privat tidak mampu berjalan dengan semestinya. Belanja pemerintah tersebut tertuang dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN). APBN merupakan instrumen kebijakan fiskal dan berfungsi sebagai bentuk intervensi pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Pemerintah juga telah mengambil langkah strategis melalui berbagai pendekatan fleksibilitas maupun mengurangi jalur birokrasi untuk mengoptimalkan tingkat realisasi penyerapan anggaran pada kementerian/ lembaga. Dengan langkah tersebut diharapkan belanja APBN dapat lebih berdampak terhadap perekonomian khususnya pada sektor riil, sehingga APBN dapat lebih tercermin sebagai fungsi stabilisasi dan distribusi.

Belanja pemerintah pusat yang ada dalam struktur APBN dirinci menjadi beberapa jenis belanja dalam DIPA, dan memainkan peranan yang sangat penting dalam pencapaian realisasi anggaran Kementerian/Lembaga. Besaran dan komposisi anggaran belanja pemerintah pusat dalam operasi fiskal pemerintah mempunyai dampak yang signifikan pada permintaan agregat dan *output* pada Kementerian/Lembaga, serta mempengaruhi alokasi sumberdaya dalam perekonomian. Besaran belanja pemerintah pusat terus meningkat dari tahun ke tahun.

Perencanaan menjadi faktor yang mempengaruhi serapan anggaran karena masih adanya anggapan bahwa tidak semua anggaran yang diusulkan akan disetujui, sehingga anggaran yang diusulkan lebih besar dari yang dibutuhkan tanpa memperhatikan kebutuhan riil dilapangan dan kemudahan dalam implementasinya. Perencanaan anggaran yang tidak akurat juga mengakibatkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) harus dilakukan revisi, sebelum pelaksanaan. Revisi DIPA tersebut menyebabkan jadwal kegiatan harus dilakukan penyesuaian, dan waktu pelaksanaan menjadi mundur. Kegiatan dan program juga belum dapat dilaksanakan sebelum persetujuan revisi DIPA tersebut disahkan, karena kegiatan dan program tersebut dapat dikategorikan belum ada alokasi anggaran. Sesuai pasal 3 ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Pencatatan Administrasi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran. Pencatatan administrasi sangat diperlukan sehingga dapat digunakan sebagai, bukti pencatatan, pengambilan keputusan dan pelaporan sehingga dapat mempengaruhi penyerapan anggaran dengan baik. Kementerian keuangan mengungkapkan lambatnya proses pencairan anggaran untuk pembayaran proyek kepada kontraktor sering kali disebabkan oleh kesalahan prosedur yang dilakukan oleh satuan kerja pemerintah.

Selain itu kompetensi sumber daya manusia juga menjadi faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran. Menurut Halim 2014 kompetensi sumber

daya manusia merupakan faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran. semua kompetensi sumber daya manusia tersebut sangat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Bagaimanapun kemajuan teknologi yang digunakan tanpa adanya dukungan sumber daya manusia akan sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Sumber daya manusia akan bekerja dengan semua kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang dimilikinya untuk efektifitas pencapaian tujuan organisasi.

Keberhasilan penyerapan anggaran juga dipengaruhi oleh lingkungan birokrasi. Birokrasi menurut Aldita 2018, adalah struktur tertentu yang memiliki karakteristik hierarki, difrensiasi dan kualifikasi. Hierarki berkaitan dengan struktur jabatan yang mengakibatkan perbedaan tugas dan wewenang antar anggota organisasi. Diferensiasi yang dimaksud perbedaan tugas dan wewenang antar anggota organisasi birokrasi dalam mencapai tujuan. Sedangkan kualifikasi adalah seorang birokrat hendaknya memiliki kualifikasi atau kompetensi untuk melaksanakan tugas atau wewenangnya secara profesional. Lingkungan birokrasi yang mempengaruhi birokrasi pemerintah akan berdampak pada berjalan lancar atau tidaknya kegiatan operasional pemerintah. Aturan dan prosedur yang mengikat dan terkoordinasinya sumber daya manusia akan mempengaruhi praktik birokrasi. Oleh karena itu, lingkungan birokrasi sangat mempengaruhi penyerapan anggaran secara maksimal dan proporsional

Penelitian yang sudah dilakukan oleh Jumriani 2018 tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Serapan Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Parepare. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Dokumen Perencanaan,

Pencatatan administrasi, Sumber daya manusia, dan Uang Persediaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Yanuriza 2019 tentang Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pencatatan Administrasi, Sumberdaya Manusia, Komitmen Organisasi dan Lingkungan Birokrasi terhadap Penyerapan Anggaran PNBK Kegiatan Pengamanan Objek Vital pada Satker Jajaran Polda Riau. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa variabel perencanaan anggaran, catatan administrasi, sumber daya manusia, komitmen organisasi mempengaruhi penyerapan anggaran sedangkan variabel lingkungan birokrasi tidak mempengaruhi penyerapan anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Jumriani (2018) tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menemukan bahwa dokumen perencanaan merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Ardana 2016 tentang Pengaruh Komitmen Organisasi, Dokumen Pengadaan, Pengawasan Internal, Dan Kompetensi SDM terhadap Penyerapan Anggaran (Studi pada SKPD Kabupaten Jembrana) menemukan bahwa komitmen organisasi, dokumen pengadaan, pengawasan internal dan kompetensi SDM berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Fenomena penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah di Kabupaten Siak tahun 2018 masih rendah yang menyertuh angka 41%. Rendahnya realisasi keuangan salah satu penyebabnya, target pendapatan dari sektor pajak kurang memuaskan, ditambah tunda bayar dari pemerintah pusat ke

daerah melalui dana bagi hasil (DBH). Akibatnya pemda mengalami defisit anggaran. Sedangkan tahun 2019, hingga akhir bulan Mei 2019 serapan APBD kabupaten Siak hingga Bulan Mei untuk Tahun anggaran 2019 hingga saat ini realisasi fisiknya sudah sampai diangka 26,68 persen sedangkan realisasi keuangan sudah diangka 39,45 persen. Masih rendahnya serapan keuangan ini, kata Hendrisan, terjadi disebabkan sejumlah kegiatan yang terdapat di dalam APBD Kabupaten Siak Tahun anggaran 2019 baru saja dilelang dan sebagiannya baru mulai dikerjakan. Tapi, nantinya apabila tekanan sudah mulai melakukan pencairan Sudja barang tentu serapan APBD akan terjadi peningkatan yang signifikan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka penelitian ini akan dilakukan dengan judul **Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pencatatan Administratif, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Lingkungan Birokrasi Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Siak.**

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang di ajukan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh perencanaan anggaran terhadap tingkat penyerapan anggaran pada organisasi perangkat (OPD) daerah Kabupaten Siak?
2. Apakah terdapat pengaruh pencatatan administratif terhadap tingkat penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Siak?

3. Apakah terdapat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap tingkat penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Siak?
4. Apakah terdapat pengaruh lingkungan birokrasi terhadap tingkat penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Siak?
5. Apakah terdapat pengaruh perencanaan anggaran, pencatatan administratif, kompetensi sumber daya manusia dan lingkungan birokrasi terhadap tingkat penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Siak?

### 1.3 Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan anggaran terhadap tingkat penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Siak.
- b. Untuk mengetahui pengaruh pencatatan administratif terhadap tingkat penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Siak.
- c. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap tingkat penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Siak.
- d. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan birokrasi terhadap tingkat penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Siak.
- e. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan anggaran, pencatatan administratif, kompetensi sumber daya manusia dan lingkungan birokrasi terhadap tingkat penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Siak.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, untuk menambah wawasan penulis tentang penerapan serta pengembangan ilmu yang penulis peroleh selama kuliah.
- b. Bagi organisasi Perangkat Daerah (OPD), dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi para pengambil keputusan dalam penyerapan anggaran di organisasi perangkat daerah Kabupaten Siak.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai referensi bagi penulis lainnya yang ingin membahas masalah ini dimasa yang akan datang.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Agar diperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam penelitian ini maka penulis menguraikan secara ringkas masing-masing bab dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

##### **BAB II : TELAAH PUSTAKA**

Bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan untuk membantu memecahkan masalah penelitian yang meliputi teori yang digunakan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, model penelitian, dan hipotesis penelitian.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang meliputi objek penelitian, populasi, dan sampel, teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, operasional variabel dan pengukuran, pengujian data, metode analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan deskripsi hasil penelitian berdasarkan data-data yang dikumpulkan, analisis data dan pembahasan hasil analisis.

**BAB V : SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menguraikan kesimpulan yang data di tarik berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data.



## BAB II

### TELAAH PUSTAKA

#### 2.1 Telaah Pustaka

##### 2.1.1 Teori *Stakeholder*

Pengertian *stakeholder* menurut Freeman dan Reed Ulum, 2013 adalah “sekelompok orang atau individu yang diidentifikasi dapat mempengaruhi dan dapat dipengaruhi oleh suatu tujuan pencapaian tertentu”. Para pemegang saham, para supplier, bank, para *customer*, pemerintah dan komunitas memegang peranan penting dalam organisasi (berperan sebagai *stakeholder*).

Pemerintahan merupakan bagian dari beberapa elemen yang membentuk masyarakat dalam sistem sosial yang berlaku. Keadaan tersebut kemudian menciptakan sebuah hubungan timbal balik antara pemerintah dan para *stakeholder* yang berarti pemerintah harus melaksanakan peranannya secara dua arah untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan sendiri maupun *stakeholder* lainnya dalam sebuah sistem sosial. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dihasilkan dan dilakukan oleh masing-masing bagian dari *stakeholder* akan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya.

Sejalan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pemerintah sebagai *stakeholder* yang memiliki peran penting dalam proses memajukan suatu daerah, pemerintah diharapkan mampu untuk melakukan upaya pembangunan secara maksimal. Kemajuan suatu daerah dilihat dari bagaimana pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi suatu daerah

harus mampu mengelola anggaran yang ada untuk kepentingan rakyat didaerahnya.

### **2.1.2 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Konsep teori keagenan menurut Supriyono 2018 yaitu hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Hubungan ini dilakukan untuk suatu jasa dimana principal memberi wewenang kepada agen mengenai pembuatan keputusan yang terbaik bagi principal dengan mengutamakan kepentingan dalam mengoptimalkan laba perusahaan, sehingga meminimalisir beban. Hubungan keagenan pada sektor publik dapat dilihat pada penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dimana pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menyusun anggarannya sendiri, tetapi nantinya akan ada proses pertanggungjawaban dari pelaksanaan anggaran yang telah disusun tersebut. Untuk itu pemerintah daerah harus melaksanakan anggaran dengan hati-hati agar tercapai masyarakat yang sejahtera.

### **2.1.3 Anggaran**

#### **2.1.3.1 Definisi Anggaran**

Anggaran merupakan pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran yang telah disusun akan dievaluasi pada akhir tahun untuk melihat apakah estimasi kinerja tersebut telah tercapai. Pencapaian kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dalam bentuk kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan Bastian 2016.

Anggaran adalah sejumlah uang yang tersedia untuk membiayai kegiatan/program dalam periode tertentu. Anggaran dapat dibuat melalui proses penyusunan rancangan keuangan yaitu pemasukan dan pengeluaran, selanjutnya dana tersebut dialokasikan ke setiap kegiatan berdasarkan dengan fungsi dan sasaran yang hendak dicapai. Setiap kegiatan tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam program berdasarkan tugas dan tanggung jawab dari satuan kerja tertentu Nurkholis, dan Khusaini, 2019. Pembuatan anggaran sektor publik sendiri diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan sebagainya agar terjamin secara layak. Dalam proses penyusunan anggaran sektor publik harus sesuai dengan dengan peraturan lembaga yang lebih tinggi. Undang-Undang Nomer. 17/2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomer. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomer. 15/2004 tentang pemeriksaan. Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bastian, 2016. Ketiga perundang-undangan tersebut dapat membuat perubahan dalam penyelenggaraan pemerintah serta pengaturan keuangan negara, khususnya dalam pembuatan rancangan dan Anggaran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Menurut Munandar 2014, anggaran yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang. Menurut Nafarin 2016, mendefinisikan bahwa anggaran (*budget*) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi

yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa.

Anggaran sektor publik sangat penting adanya karena (1) Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan ekonomi nasional, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (2) Anggaran diperlukan karena tidak terbatas dan terus berkembangnya kebutuhan dan kegiatan masyarakat. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya. (3) Anggaran merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada Nurkholis dan Khusaini, 2019.

Serapan anggaran dalam hal ini adalah kemampuan Pemda untuk merealisasikan sejumlah anggaran yang sudah ditetapkan bersama lembaga legislatif (DPRD) di dalam APBD yang dinyatakan dengan skala ordinal. Penentuan skala pengukuran dilakukan melalui kesepakatan daerah. Sampai saat ini pemerintah pusat maupun daerah belum memiliki definisi baku tentang nilai persentase suatu daerah yang tergolong rendah serapan anggaran APBD-nya. Namun ada beberapa daerah memiliki Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan pimpinan SKPD yang menyetujui suatu Pemda dinyatakan rendah serapan anggarannya apabila sampai dengan akhir tahun tidak mampu merealisasikan 90% dari total APBD yang telah disusun.

Penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban penyerapan anggaran. Tahapan penyerapan anggaran ini dimulai ketika Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disahkan oleh DPR. Dalam rangka terjadinya kesatuan pemahaman serta kesatuan langkah dalam pelaksanaan, pemerintah sebagai pelaksana dari UU APBN selanjutnya menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai dasar hukum pelaksanaan APBN. Pada saat ini Keppres yang berlaku adalah Keppres nomor 42 tahun 2002 Kuncoro, 2013.

Kinerja manajer publik akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran, berapa yang berhasil dicapai. Penilaian kinerja dilakukan dengan menganalisis simpangan kinerja aktual dengan yang dianggarkan Mardiasmo, 2016. Dalam teori ekonomi makro, belanja pemerintah merupakan salah satu elemen untuk menjaga pertumbuhan ekonomi suatu negara. Belanja pemerintah, khususnya belanja barang dan jasa, merupakan salah satu komponen utama yang membentuk Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP).

Penyerapan anggaran, khususnya belanja barang dan jasa, memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu setiap instansi pemerintah harus mengatur pengeluarannya agar berjalan lancar dan dapat mendukung keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Namun demikian penyerapan anggaran tidak diharuskan mencapai 100%, tetapi penyerapan anggaran diharapkan mampu memenuhi setidaknya-tidaknya lebih dari 80% anggaran yang telah ditetapkan. Tinggi rendahnya penyerapan anggaran dalam suatu organisasi perangkat daerah menjadi tolak ukur kinerja dari organisasi perangkat daerah tersebut.

### 2.1.3.2 Proses Penyusunan Anggaran

Penyusunan anggaran dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, hal ini tergantung dari kebijakan dan ketetapan perusahaan yang menunjukkan siapa yang bertanggungjawab terhadap penyusunan anggaran perusahaan, hal ini tergantung dari kebijakan dan ketetapan perusahaan yang menunjukkan siapa yang bertanggung jawab terhadap penyusunan anggaran perusahaan. Menurut Sofyan 2012, metode yang dapat dipergunakan dalam penyusunan anggaran adalah sebagai berikut:

#### 1. Otoriter atau *Top Down*

Dalam metode ini anggaran disusun dan ditetapkan sendiri oleh pimpinan dan anggaran ini dilaksanakan oleh bawahan tanpa adanya keterlibatan dalam penyusunannya. Metode ini ada baiknya digunakan bila karyawan tidak mampu menyusun anggaran atau dianggap terlalu lama dan tidak tepat jika diserahkan kepada bawahannya. Hal ini bisa terjadi dalam perusahaan yang karyawannya tidak memiliki cukup keahlian untuk menyusun anggaran. Atasan bisa saja menggunakan jasa konsultan atau tim khusus untuk melaksanakan.

#### 2. Demokrasi atau *Bottom up*

Anggaran disusun berdasarkan hasil keputusan karyawan. Anggaran disusun mulai dari bawahan sampai atasan, dimana bawahan diserahkan sepenuhnya menyusun anggaran yang ditargetkan pada masa akan datang. Metode ini digunakan jika karyawan sudah memiliki kemampuan dalam menyusun anggaran dan tidak khawatir akan menimbulkan proses yang lama dan berlarut.

3. Campuran antara *Top Down* dan *Bottom up*

Penyusunan anggaran dimulai dari atas dan selanjutnya diserahkan untuk dilengkapi dan dilanjutkan oleh karyawan/bawahan. Jadi pedoman dari atasan atau pimpinan dan kemudian dijabarkan oleh bawahan sesuai dengan arahan dari atasan.

Sehubungan dengan fungsi APBD salah satunya yaitu untuk mengurangi pemborosan anggaran dan dapat memelihara serta mengupayakan tercapainya keseimbangan perekonomian, maka penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 33 Pasal 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 ditetapkan prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai kebutuhan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab daerah
2. Tertib, taat terhadap ketentuan undang-undang, efisien, efektif, ekonomis, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa kepatutan, keadilan dan manfaat bagi masyarakat.
3. Tepat waktu, sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditentukan dalam undang-undang.

4. Transparan, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi sebesar besarnya terkait APBD.
5. Partisipatif, melibatkan masyarakat dalam penyusunan APBD.
6. Tidak bertentang dengan kepentingan umum, peraturan undang-undang yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

### 2.1.3.3 Perencanaan Anggaran

Secara umum perencanaan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk masa mendatang yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun keadaan telah lalu. Perencanaan (*planning*) merupakan proses yang diawali dengan penetapan tujuan organisasi berupa penentuan strategi untuk pencapaian tujuan secara menyeluruh serta perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga tercapainya tujuan tersebut Bastian 2016.

Dasar hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah mengacu pada beberapa produk perundang-undangan Miliasih 2012 sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo UU 12 tahun 2008;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Perencanaan dapat dilihat dalam tiga kategori yaitu:
- a. Kategori Proses  
Perencanaan merupakan suatu proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cara atau strategi dalam pencapaian tujuan tersebut.
  - b. Kategori Fungsi Manajemen  
Perencanaan berfungsi pada kondisi dimana pimpinan menggunakan pengaruh atau wewenang untuk menentukan atau mengubah tujuan serta kegiatan organisasi.
  - c. Kategori Pengambilan Keputusan  
Perencanaan adalah pengambilan keputusan jangka panjang atau yang akan datang mengenai hal yang akan dilakukan, cara pelaksanaan, dan waktu serta pelaku hal tersebut. Dalam perencanaan, keputusan yang diambil belum tentu sesuai dengan tujuan sebelumnya sehingga implementasi perencanaan tersebut akan dibuktikan pada masa yang akan datang.

Perencanaan anggaran adalah salah satu bagian dari perencanaan organisasi, baik untuk organisasi publik maupun organisasi privat. Menurut Conyers dan Hills dalam Kuncoro 2012, perencanaan diartikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-

pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

Proses perencanaan dan penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara garis besar sebagai berikut:

a. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Penyusunan RKPD merupakan tahapan awal dalam perumusan APBD. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Pusat.

b. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Setelah RKPD ditetapkan, Pemerintah daerah perlu menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang kemudian menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

c. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Selanjutnya berdasarkan KUA yang telah disepakati, pemerintah daerah menyusun rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rancangan PPAS tersebut disusun dengan tahapan; menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan; menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

d. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)

Selanjutnya menyusun RKA-SKPD yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dijabarkan sampai dengan penjabaran objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. RKA-SKPD juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.

a. Penyiapan Raperda APBD

Selanjutnya, berdasarkan pada RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD dilakukan pembahasan penyusunan Raperda oleh TAPD. Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD.

#### b. Penetapan APBD

Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tersebut dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

#### 2.1.3.4 Penyerapan Anggaran

Penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan anggaran dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban penyerapan anggaran. Tahapan penyerapan anggaran ini dimulai ketika Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disahkan oleh DPR. Dalam rangka terjadinya kesatuan pemahaman serta kesatuan langkah dalam pelaksanaan, pemerintah sebagai pelaksanaan dari UU APBN selanjutnya menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagai dasar hukum pelaksanaan APBN Kuncoro, 2013.

Dalam pemerintah daerah penyerapan anggaran berarti kegiatan atas pelaksanaan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (UU APBD) yang disahkan oleh DPRD. Penyerapan anggaran paling tidak ada dua macam sudut pandang. Sudut pandang pertama adalah membandingkan anggaran dengan realisasinya secara sederhana. Misalnya anggaran sebesar 100 juta sampai

akhir tahun anggaran terealisasi sebesar 91 juta berarti tingkat penyerapan anggaran sebesar 91%. Sedangkan sudut pandang kedua adalah proporsionalitas persentase penyerapan anggaran yang berarti bahwa penyerapan anggaran cenderung menumpuk di akhir tahun Paris Review, 2016

Menurut Noviwijaya, A. Dan Rohman, A. 2013 pengukuran penyerapan anggaran satuan kerja adalah proporsi/persentase jumlah anggaran yang telah direalisasikan dalam satu tahun anggaran terhadap jumlah pagu anggaran sedangkan menurut Kuncoro 2013 tingkat penyerapan anggaran merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target rencana yang telah dicapai oleh instansi.

#### **2.1.4 Pencatatan Administratif**

Administrasi secara umum dapat dibedakan menjadi dua pengertian yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Pengertian administrasi dalam arti sempit menurut Prajudi Atmosudirdjo adalah tata usaha atau *office work* yang meliputi kegiatan catat-mencatat, tulis-menulis, mengetik, korespondensi, kearsipan, dan sebagainya. Ayub, 2012. Administrasi dalam arti luas adalah proses rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang secara dinamis dalam kerjasama dengan pola pembagian kerja untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu yang rasional, secara efektif dan efisien Nawawi, 2013.

Administrasi atau tatausaha yaitu pengelolaan data dan informasi yang keluar dari dan masuk ke organisasi, maka seluruh rangkaian kegiatan-kegiatan tersebut terdiri dari penerimaan, pencatatan, pengklasifikasian, pengolahan, penyimpanan, pengetikan, penggandaan, pengiriman informasi dan data secara

tertulis yang diperlukan oleh organisasi. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam satu hubungan satu sama lain. Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi adalah kegiatan pengelolaan data dan informasi yang masuk dan keluar yang meliputi kegiatan penerimaan, pencatatan pengklasifikasian, pengelolaan, penyimpanan, pengetikan dan bersifat teknis ketatausahaan *clerical work* Herliana, 2016.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan pengertian Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan atau tindakan oleh badan atau pejabat pemerintah. Ada beberapa komponen dalam menentukan pencatatan administrasi yaitu: dokumen penyusunan anggaran, proses penyusunan dokumen anggaran, pagu anggaran, dan pemahaman peraturan Sembiring 2017.

Berdasarkan UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) disusun dengan berpedoman pada Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) dan memperhatikan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nas). Dimana visi, misi, dan program Kepala Daerah menjadi bahan utama penyusunan agenda kerja selama 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Menurut Siswandi 2017 administrasi berasal dari kata Yunani “*Ad*” dan “*ministrate*” yang berarti pengabdian atau *service* atau pelayanan. Secara naluriah,

manusia ingin selalu bersama dalam suatu kelompok, hal ini retasa atau tanpak dalam usaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang tidak dapat dilaksanakan secara individual. Kebutuhan yang menimbulkan tujuan bersama tersebut, menghendaki suatu kerjasama dari kelompok manusia sebelum melakukan tindakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan pemikiran pemikiran terlebih dahulu agar proses pencapaian tujuan itu dapat dijalankan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Masalah dilapangan yang sering terjadi antara lain anggaran kegiatan diblokir/tanda bintang karena belum ada data pendukung atau harus ada persetujuan terlebih dahulu dari DPRD atau karena anggaran tidak selaras dengan RPJMD. Hal ini kadang menyebabkan DIPA mengalami revisi. Revisi DIPA yang memerlukan waktu yang tidak sedikit sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran.

### **2.1.5 Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Menurut Sutrisno 2013, kompetensi merupakan suatu hal yang mendasari karakteristik dari seorang individu yang dihubungkan dengan hasil yang diperoleh dalam suatu pekerjaan. Kompetensi juga berkaitan dengan efektifitas kinerja seorang individu dalam pekerjaannya. Senada dengan pendapat tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 pasal 3 menjelaskan bahwa yang dimaksud kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), baik berupa pengetahuan, keterampilan maupun sikap perilaku yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas dalam jabatannya Sutisno, 2016.

Penilaian terhadap pencapaian kompetensi perlu dilakukan secara objektif berdasarkan kinerja para karyawan yang ada di dalam sebuah organisasi, dengan bukti penguasaan mereka terhadap pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap sebagai hasil belajar. Oleh karena itu perlu untuk lebih menekankan kompetensi apa yang harus dikuasai oleh sumber daya manusia dalam suatu organisasi, agar dapat dinilai sebagai wujud dari hasil pelaksanaan tugas yang memberi dampak secara langsung terhadap pengalaman.

Terdapat tiga komponen utama pembentukan kompetensi Hutapea dan Thoha, 2012 yaitu:

a. Pengetahuan (*Knowledge*)

Informasi yang dimiliki seorang individu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya haruslah sesuai dengan bidang yang digelutinya (tertentu), misalnya akuntansi, anggaran dan pengorganisasian.

b. Keahlian (*Skill*)

Keahlian yang dimiliki oleh seseorang individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya standar perilaku oara karyawan dalam memilih metode kerja dianggap lebih efektif dan lebih efisien.

c. Perilaku (*Attitude*)

Perasaan (senang dan tidak senang, suka dan tidak suka) atau reaksi/tindakan terhadap suatu rangsangan yang bersumber dari luar. Misalnya reaksi terhadap kondisi pereknomian, perasaan terhadap penurunan laba.

Kompetensi menurut Permendagri No. 2 Tahun 2013[8] pasal 1 adalah “kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.

Pengaruh yang ditimbulkan oleh pengelolaan anggaran dan SDM yang salah sangat banyak seperti contohnya pada aspek ekonomi, dimana karena adanya kesalahan pengelolaan anggaran dan penetapan SDM yang salah maka kualitas dari pelayanan akan menurun. Dalam hal ini proses perekonomian Indonesia akan lambat karena ketidakmampuan SDM dalam mengelola dengan baik. Di era globalisasi ini tentunya Pemerintah Indonesia sangat membutuhkan SDM yang mampu mengelola anggaran dengan baik.

#### **2.1.6 Lingkungan Birokrasi**

Birokrasi adalah alat atau teknik yang dibuat demi keberhasilan dan kemampuan suatu pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Lingkungan disini adalah lingkungan internal maupun lingkungan eksternal organisasi. Pada lingkungan internal organisasi memberikan dampak yang terjadi di dalam organisasi tersebut seperti hubungan antar karyawan, sosialisasi, pengendalian internal organisasi, dan lain-lain. Kondisi internal pegawai ini senantiasa berganti dan berkembang, sehingga mewujudkan sebuah pemahaman yang sesuai, agar permasalahan-permasalahan yang timbul dapat dipecahkan. Berbeda dengan lingkungan internal, lingkungan eksternal organisasi lebih fokus terhadap kondisi yang terjadi diluar organisasi seperti pihak luar yang

bekerjasama, kebijakan Negara, pembaruan teknologi, serta masyarakat umum Matheus dan Sulistiyani, 2016.

Menurut Miftha Thoa (2016), birokrasi adalah suatu kerajaan yang raja-raja adalah para pejabat dari suatu bentuk organisasi yang digolongkan modern. Di dalamnya terdapat tanda-tanda bahwa seseorang mempunyai yurisdiksi tersebut seseorang mempunyai tugas dan tanggung jawab resmi (official duties) yang memperjelas batas-batas wewenang pekerjaannya. Mereka bekerja dalam tatanan pola hirarki sebagai perwujudan dari tingkatan otoritas dan kekuasaannya. Mereka memperoleh gaji berdasarkan keahliannya dan kompetensinya. Selain, itu dalam kerajaan pejabat tersebut, proses komunikasinya didasarkan pada komponen tertulis (the files). Itulah kerajaan birokrasi yang rajanya para pejabat.

Apabila suatu birokrasi tidak dapat berfungsi dalam tipe ideal organisasi tertentu maka kita dapat menarik suatu penjelasan mengapa hal tersebut dan apa faktor-faktor yang membedakannya. Menurut Weber tipe ideal biokrasi itu ingin menjelaskan bahwa suatu biokrasi atau administrasi itu mempunyai suatu bentuk yang pasti dimana semua fungsi dijalankan dalam cara-cara yang rasional

Sedangkan menurut Max Weber, birokrasi diartikan sebagai suatu organisasi atau unit pekerjaan sosial yang fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sampai saat ini, konsep yang diterima secara umum adalah bahwa birokrasi adalah struktur organisasi terbaik untuk spesialisasi pekerjaan. Lingkungan birokrasi yang baik dan sehat akan menjadikan pelaksanaan kegiatan operasional pemerintah menjadi lancar. Tetapi jika lingkungan birokrasi tidak mendukung kegiatan organisasi maka akan

menghambat kinerja organisasi. Oleh karena itu, lingkungan birokrasi akan memengaruhi penyerapan anggaran.

Kemunculan konsep birokrasi dalam sebuah pemerintahan ternyata ikut mendorong perbaikan di berbagai bidang, terutama perbaikan terhadap pelayanan publik yang semakin membutuhkan perhatian serius mengingat semakin kompleksnya permasalahan administratif seiring berjalannya waktu. Aturan-aturan itu pada akhirnya akan membentuk sebuah sistem yang diakui oleh rakyat secara keseluruhan sebagai sesuatu yang fundamental.

Secara umum, konsep birokrasi lebih banyak diperkenalkan oleh sosiolog Jerman, Maximilian Weber. Konsep ini muncul ditengah era revolusi industri di Inggris. Era tersebut berpengaruh banyak terhadap perubahan struktur sosial, yang ikut mendorong pemerintah untuk terlibat aktif dalam kebijakan dan pelayanan public. Peran pemerintah yang dituntut semakin luas dan besar ini menurut Weber, tidak diimbangi dengan struktur organisasi yang memadai guna menampung persoalan-persoalan sosial-politik yang semakin meningkat tajam.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel II.1  
Penelitian Terdahulu

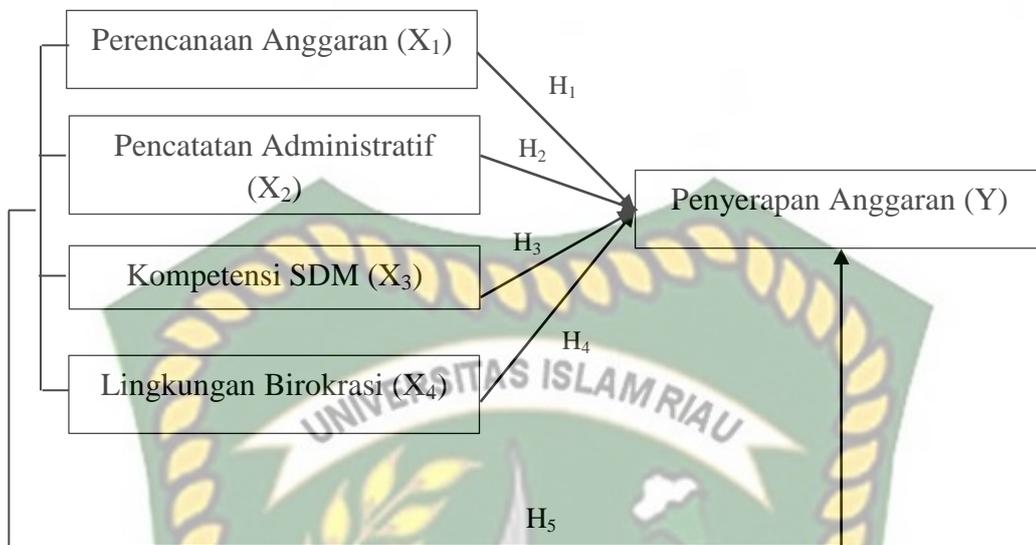
No	Nama Peneliti / Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Yanuriza (2019)	Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pencatatan Administrasi, Sumberdaya Manusia, Komitmen Organisasi dan Lingkungan Birokrasi terhadap Penyerapan Anggaran	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, catatan administrasi, sumber daya manusia, komitmen organisasi mempengaruhi penyerapan anggaran sedangkan variabel lingkungan birokrasi tidak mempengaruhi penyerapan

		PNBP Kegiatan Pengamanan Objek Vital pada Satker Jajaran Polda Riau	anggaran dalam kegiatan Safeguard dari benda vital di Satker Kepolisian Daerah Riau.
2	Jumriani (2018)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Hasil penelitian dengan regresi linier berganda menunjukkan Dokumen Perencanaan, Pencatatan administrasi, Sumber daya manusia, dan Uang Persediaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.
3	Ardana (2016)	Pengaruh Komitmen Organisasi, Dokumen Pengadaan, Pengawasan Internal, Dan Kompetensi SDM terhadap Penyerapan Anggaran (Studi pada SKPD Kabupaten Jembrana)	Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa: (1) terdapat pengaruh positif signifikan antara komitmen organisasi terhadap penyerapan anggaran, (2) terdapat pengaruh positif signifikan antara dokumen pengadaan terhadap penyerapan anggaran, (3) terdapat pengaruh positif signifikan antara pengawasan internal terhadap penyerapan anggaran, (4) terdapat pengaruh positif signifikan antara kompetensi SDM terhadap penyerapan anggaran, (5) terdapat pengaruh signifikan antara komitmen organisasi, dokumen pengadaan, pengawasan internal, dan kompetensi SDM terhadap penyerapan anggaran.

### 2.3 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian

#### 2.3.1 Kerangka Pemikiran

Untuk lebih menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen yang digunakan dalam peneliti ini maka berikut digambarkan model penelitian sebagai berikut ini:



#### 2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka hipotesis penelitian yang dapat di buat adalah sebagai berikut:

- H<sub>1</sub> : Diduga perencanaan anggaran berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran.
- H<sub>2</sub> : Diduga pencatatan administratif berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran.
- H<sub>3</sub> : Diduga kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran.
- H<sub>4</sub> : Diduga lingkungan birokrasi berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran.
- H<sub>5</sub> : Diduga perencanaan anggaran, pencatatan administratif, kompetensi sumber daya manusia dan lingkungan birokrasi berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran.

## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan metode survey. Menurut Nawawi 2012 metode deskriptif yaitu metode-metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat.

### 3.2 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah perencanaan anggaran, pencatatan administrative, kompetensi sumber daya manusia dan lingkungan birokrasi terhadap tingkat penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Siak.

### 3.3 Operasional Variabel Penelitian

Dalam variabel penelitian ini adalah mengetahui pengaruh pelaksanaan anggaran dan pencatatan administratif terhadap tingkat penyerapan anggaran maka operasional variabel penelitian adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan anggaran adalah suatu kegiatan pengalokasian anggaran yang dilakukan untuk masa mendatang yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan saat ini maupun keadaan yang sudah lalu yang diukur dengan menggunakan skala likert dalam bentuk kuisioner dengan indikator yang

telah digunakan dari penelitian Saryanto 2017 yaitu kesesuaian dengan kebutuhan (prioritas), kesesuaian dengan aturan, ketepatan waktu (disiplin), mudah dipahami, kesalahan administrasi (revisi), partisipatif.

2. Pencatatan administratif adalah pencatatan yang dilakukan terhadap penyerapan anggaran yang diukur dengan menggunakan skala likert dalam bentuk kuisisioner dengan indikator yang telah digunakan dari penelitian Sembiring 2017 yaitu dokumen penyusunan anggaran, proses penyusunan dokumen anggaran, pagu anggaran, pemahaman peraturan.
3. Kompetensi sumber daya manusia adalah suatu hal yang mendasari karakteristik dari seorang individu yang dihubungkan dengan hasil yang diperoleh dalam suatu pekerjaan yang diukur dengan menggunakan skala likert dalam bentuk kuisisioner dengan indikator yang telah digunakan dari penelitian Saryanto 2017 yaitu pengetahuan, keahlian, perilaku.
4. Lingkungan birokrasi adalah aturan pejabat sebagai sebuah alat atau mekanisme yang dibuat untuk kesuksesan dan efisiensi suatu pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu yang diukur dengan menggunakan skala likert dalam bentuk kuisisioner dengan indikator yang telah digunakan dari penelitian Gagola 2017 yaitu koordinasi antar pegawai terjalin dengan baik, jumlah pegawai yang terlibat terkait pengelolaan keuangan, pengadaan barang jasa mencukupi, pemahaman peraturan.
5. Penyerapan anggaran adalah proporsi anggaran satuan kerja yang telah dicairkan atau direalisasikan dalam satu tahun anggaran yang diukur

dengan menggunakan skala likert dalam bentuk kuisioner dengan indikator yang telah digunakan dari penelitian Rohman 2013 yaitu perbandingan realisasi anggaran dengan target penyerapan anggaran, konsistensi dalam pelaksanaan program/kegiatan, ketepatan jadwal penarikan anggaran.

### 3.4 Populasi dan Sampel

Menurut Arikunto 2014 populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah organisasi perangkat daerah di Kabupaten Siak. Dalam penelitian ini seluruh populasi dijadikan sebagai sampel. Dalam pengumpulan sampel, penulis menggunakan *nonprobability sampling* dimana metode yang digunakan adalah *purposive sampling*. Dari jumlah organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Siak masing-masing organisasi perangkat daerah dikirim 3 kuesioner untuk diisi. Peneliti mengambil 81 sampel dengan kriteria yaitu orang yang menduduki jabatan dalam bidang yang berkaitan dengan pengelola keuangan. Berikut adalah rincian sampel penelitian:

Tabel 3.1 Jumlah Populasi Penelitian

	Dinas/Instansi Pemerintahan	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	4	16	82	55	157
2	Dinas Kesehatan	1	16	78	7	102
3	Dinas Bina Marga dan Pengairan	0	31	92	2	125
4	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	1	6	56	2	65
5	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0	8	21	3	32
6	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	1	2	33	4	40
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	3	27	7	39
8	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja	0	8	30	6	44
9	Dinas Perhubungan Informasi Dan Komunikasi	1	20	43	4	68
10	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset	1	10	53	5	69
11	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan	12	17	19	2	50
12	Dinas Pertanian	0	20	35	5	60
13	Dinas Peternakan	0	24	67	2	93

Dinas/Instansi Pemerintahan		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
14	Dinas Perikanan	0	3	47	5	55
15	Dinas Perkebunan	1	26	43	4	74
16	Dinas Kehutanan	0	20	72	3	95
17	Dinas Perindustria, Perdagangan Dan Pasar	1	6	46	7	60
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1	5	22	2	30
19	Inspektorat Kabupaten	0	8	42	15	65
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	11	47	8	66
21	Badan Kepegawaian Daerah	1	16	26	4	47
22	Badan Lingkungan Hidup	0	7	25	4	36
23	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal	0	6	24	6	36
24	Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan	2	4	101	7	114
25	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	1	5	200	13	219
26	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	0	9	27	7	43
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	22	18	6	49
<b>Total</b>		<b>33</b>	<b>329</b>	<b>1376</b>	<b>195</b>	<b>1933</b>

Sumber: BPS Kabupaten Siak

Adapun kriteria sampel adalah pegawai bagian keuangan yang terdiri dari Kepala Bidang Keuangan, Staf Keuangan, Bendahara. Masing-masing bagian keuangan diwakili oleh 3 orang pegawai sehingga jumlah sampel sebanyak = 27 organisasi perangkat daerah x 3 = 81 orang.

### 3.5 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Data Primer

Yaitu data penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian langsung ke lapangan, seperti jawaban responden yang menggambarkan terhadap perencanaan, pelaksanaan anggaran, pencatatan administrative, kompetensi sumber daya manusia dan tingkat penyerapan anggaran. Untuk maksud tersebut peneliti menggunakan angket.

b. Data Sekunder

Yaitu segala informasi yang diperlukan untuk menyusun data-data penelitian baik berupa, konsep, atau teori-teori yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan permasalahan. Untuk maksud tersebut penulis menggunakan metode kepustakaan.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. *Quisioner*, yaitu metode pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner (daftar pertanyaan) yang ditujukan kepada responden.
- b. Dokumentasi, yaitu salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.

### 3.7 Analisis Data

Dari uraian diatas telah dijelaskan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat penyerapan anggaran sebagai variabel dependen, dimana akan dipengaruhi oleh variabel perencanaan anggaran, pencatatan administratif, kompetensi sumber daya manusia dan lingkungan birokrasi sebagai variabel independen. Untuk menguji hipotesis dan menyatakan kejelasan tentang kekuatan variabel independen mempengaruhi variabel dependen dalam penelitian ini digunakan analisis Regresi Linear Berganda, dan dalam pengolahan data

digunakan bantuan program SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) versi 20.0. Adapun bentuk model statistik yang digunakan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Dimana :

$X_1$  = Perencanaan Anggaran

$X_2$  = Pencatatan Administratif

$X_3$  = Kompetensi Sumber Daya Manusia

$X_4$  = Lingkungan Birokrasi

$Y$  = Penyerapan Anggaran

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_{(1,2)}$  = Koefisien Regresi

$\varepsilon$  = Variabel Pengganggu

### 3.7.1 Uji Kualitas Data

Kesimpulan penelitian berupa jawaban atau pemecahan masalah penelitian, dibuat berdasarkan hasil proses pengujian data yang meliputi pemilihan, pengumpulan dan analisis data. Oleh karena itu, kesimpulan tergantung pada kualitas data yang dianalisis dan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian.

#### 1) Uji Validitas (Ketepatan)

Validitas data penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. Suatu instrumen pengukuran dikatakan valid jika instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur dengan kata lain instrumen tersebut dapat mengukur construct sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini

pengujian validitas diukur dengan cara menggunakan analisis metode koefisien korelasi (*pearson correlation*). Jika korelasi antara masing-masing indikator variabel signifikan, maka dinyatakan valid. Dalam signifikan pada level 0,01 (*2-tailed*) Ghazali, 2013.

## 2) Uji Reliabilitas

Reliabilitas suatu pengukuran menunjukkan stabilitas dan konsistensi dari suatu instrumen yang mengukur suatu konsep. Konsep reliabilitas dapat dipahami melalui ide dasar konsep yaitu konsistensi. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik *Cronbach's Alpha* ( $\alpha$ ). Suatu item dikatakan reliabel jika  $\alpha$  yang dihasilkan lebih besar dari 0,60 Ghazali, 2013.

### 3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Model regresi akan menghasilkan estimator tidak bias yang baik jika memenuhi asumsi klasik yaitu bebas autokorelasi, multikolinearitas, dan heterokedastisitas serta pola distribusi data harus normal. Jika asumsi klasik tidak dipenuhi maka variabel-variabel yang digunakan menjadi tidak efisien. Ada tiga asumsi yang harus diperhatikan, yaitu:

#### 1) Normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah data yang digunakan mengikuti pola distribusi normal atau tidak. Karena model yang baik data harus mengikuti pola distribusi normal. Pendapat ahli statistik menyatakan jika jumlah sampel sama atau lebih dari 30 maka diasumsikan data sudah mengikuti pola distribusi normal. Namun dalam penelitian ini tetap dilakukan uji normalitas.

Pengujian normalitas dilakukan dengan uji *one-sample kolmogorove smirnov* dan *Normal P-Plot Regression*.

## 2) Multikolinearitas

Tujuan utama dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah variabel independen yang ada memang benar-benar mempunyai hubungan yang erat dengan dengan variabel dependen. Suatu model regresi mengandung multikolinearitas jika ada hubungan yang sempurna antara variabel independen. Konsekuensinya adalah bahwa kesalahan standar estimasi akan cenderung meningkat dengan bertambahnya variabel independen. Tingkat signifikansi yang digunakan untuk menolak hipotesis nol akan semakin besar, dan probabilitas menerima hipotesis yang salah juga semakin besar, sehingga model regresi yang diperoleh tidak valid untuk menaksir nilai variabel independen. Model regresi bebas multikolinearitas apabila Santoso, 2014:

- a) Mempunyai nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) sekitar angka 1
- b) Mempunyai angka *Tolerance* mendekati 1

## 3) Heterokedastisitas

Heterokedastisitas diartikan sebagai tidak samanya varian bagi variabel independen yang diuji dalam setting yang berbeda. Pengujian dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatter plot*. Jika membentuk pola tertentu, maka terdapat heterokedastisitas.

## 4) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model *regresi linear* ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada

periode t-1 (sebelumnya) Ghazali, 2013. Uji autokorelasi variabel penelitian dilakukan dengan melihat perhitungan angka Durbin-Waston.

### 3.7.3 Uji Hipotesis

#### 1) Uji secara Parsial (uji statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Hal ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b) Jika nilai signifikan  $< 0,05$  maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Hal ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

#### 2) Uji secara Simultan (Uji Statistik F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan pada uji F ini digunakan  $\alpha = 5\%$  yang artinya kemungkinan kesalahan hanya boleh lebih kecil atau sama dengan 5%. Jika lebih besar dari 0,05 maka variabel tersebut tidak layak dipakai.

### 3.7.4 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen.

Semakin besar nilai koefisien determinasi, semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya, yang berarti persamaan regresi baik digunakan untuk mengestimasi nilai variabel dependen.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.1.1 Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Siak adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Sebelumnya kawasan ini merupakan bagian dari Kesultanan Siak Sri Inderapura. Di awal kemerdekaan Indonesia, Sultan Syarif Kasim II, merupakan Sultan Siak terakhir menyatakan kerajaannya bergabung dengan negara Republik Indonesia. Kemudian wilayah ini menjadi wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Pada tahun 1999 berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999, meningkat statusnya menjadi Kabupaten Siak dengan ibukotanya Siak Sri Indrapura.

Secara geografis Kabupaten Siak terletak pada koordinat 10 16' 30"-00 20' 49" Lintang Utara dan 100 54' 21" 102° 10' 59" Bujur Timur. Secara fisik geografis memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran dengan sejumlah negara tetangga dan masuk kedalam daerah segitiga pertumbuhan (growth triangle) Indonesia - Malaysia - Singapura.

Bentang alam Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah di bagian Timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Pada umumnya struktur tanah terdiri dari tanah podsolik merah kuning dan batuan dan alluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Lahan semacam ini subur untuk pengembangan pertanian, perkebunan

danperikanan. Daerah mi beriklim tropis dengan suhu udara antara 25° -- 32° Celsius, dengan kelembaban dan curah hujan cukup tinggi.

#### 4.1.2 Visi dan Misi

##### a) Visi

Terwujudnya masyarakat Kabupaten Siak yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan berbudaya Melayu serta sebagai kabupaten dengan Pelayanan Publik Terbaik di Provinsi Riau Tahun 2016.

Secara spesifik dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Masyarakat dan daerah Kabupaten Siak adalah seluruh lapisan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Siak yang berada di wilayah Kabupaten Siak
- 2) Masyarakat Kabupaten Siak yang sehat, ditandai dengan tingginya tingkat kesehatan masyarakat yang prima sehingga menjadi masyarakat yang memiliki daya saing yang tinggi.
- 3) Masyarakat yang cerdas, ditandai dengan tingginya inovasi, kreatifitas dan daya tanggap terhadap situasi yang ditunjang oleh tingginya derajat pendidikan
- 4) Masyarakat yang sejahtera ditandai dengan adanya kemajuan,peningkatan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi tersebut diukur berdasarkan peningkatan dalam Pendapatan per Kapita; Angka Kemiskinan dan Indeks Pemenuhan Kebutuhan Dasar
- 5) Masyarakat yang Agamis dan Berbudaya Melayu, ditandai dengan adanya kemajuan dan peningkatan dalam kehidupan beragama. Perwujudan

masyarakat yang agamis dilakukan melalui implementasi nilai- nilai keislaman (sebagai agama mayoritas) dalam kehidupan kemasyarakatan dan sebagai landasan spiritual pembangunan daerah serta dengan mewujudkan budaya melayu sebagai sarana cultural kehidupan kemasyarakatan.

- 6) Mewujudkan pelayanan publik terbaik dilakukan dengan mengimplementasikan standar pelayanan minimal (SPM) bidang pelayanan dasardan perizinan, serta secara bertahan meningkatkan mutu dan standar pelayanan menjadi pelayanan prima sehingga menjadi yang terbaik di Provinsi Riau

**b) Misi**

- 1) Meningkatkan kualitas SDM, beriman dan bertaqwa serta berbudi pekerti yang luhur melalui pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan keagamaan
- 2) Mengembangkan perekonomian daerah dan masyarakat melalui pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, perikanan dan peternakan serta sektor – sektor produktif lainnya dan dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang terbarukan
- 3) Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan perekonomian pedesaan, pembangunan sektor ketenagakerjaan serta pemerataan dan pengendalian kependudukan.

- 4) Membangun, meningkatkan dan pemeratakan pembangunan infrastruktur daerah melalui peningkatan prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan
- 5) Mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*clean government and good governance*), menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pelayanan dan perizinan dan mengoptimalkan implementasi otonomi kepada desa

## 4.2 Hasil Penelitian

### 4.2.1 Deskripsi Responden

Adapun sampel yang diteliti dalam ini adalah pegawai organisasi perangkat daerah Kabupaten Siak yang berkompeten untuk memberikan jawaban sesuai dengan tujuan penelitian. Dari 81 eksemplar kuesioner yang disebar, sebanyak 7 kuesioner tidak kembali dan kuisioner yang lengkap dan dapat di olah berjumlah 74 kuesioner. Berikut data penyebaran kuisioner:

**Tabel 4.1**  
**Daftar Hasil Kuesioner**

Item	Jumlah	Presentase
Jumlah Kuesioner yang Disebar	81	100%
Jumlah Kuesioner yang Tidak Kembali	7	20,99%
Jumlah kuesioner yang dapat diolah (sampel)	74	79,01%

Sumber: Data Hasil Penelitian, 2021

Dalam penelitian ini, yang menjadi responden adalah Kepala Bagian Keuangan, Bendahara dan Kepala Staf Program Instansi Pemerintah. Untuk melihat karakteristik responden dalam penelitian, dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Karakteristik Responden**

Dasar Klasifikasi	Sub Klasifikasi	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin Responden	Laki-Laki	43	58,11%
	Perempuan	31	41,89%
	<b>Jumlah</b>	<b>74</b>	<b>100,00%</b>
Umur Responden	25-34 tahun	18	24,32%
	35-44 tahun	35	47,30%
	≥ 45 tahun	21	28,38%
	<b>Jumlah</b>	<b>74</b>	<b>100,00%</b>
Jabatan Responden	Kepala Bag Keuangan	20	27,03%
	Kepala Sub Keuangan	26	35,13%
	Staff Bagian Keuangan	28	37,84%
	<b>Jumlah</b>	<b>74</b>	<b>100,00%</b>
Lama Bekerja Responden	5 - 10 tahun	23	31,08%
	11-20 tahun	34	45,95%
	> 20 tahun	17	22,97%
	<b>Jumlah</b>	<b>74</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Data Hasil Penelitian, 2021

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah responden laki-laki lebih banyak dibanding jumlah responden perempuan, yakni sebanyak 43 orang (58,11%), sedangkan wanita hanya 31 orang (41,89%). Proporsi terbesar responden berumur 35-44 tahun yaitu berjumlah 35 orang (47,30%), sedangkan proporsi yang paling kecil berumur  $\geq 45$  tahun yang berjumlah 21 orang (28,38%). Untuk responden yang jabatannya Kepala Bagian Keuangan sebanyak 20 orang (27,03%), Kepala Sub Keuangan sebanyak 26 orang (35,13%) Staff Bagian Keuangan sebanyak 28 orang (37,84%). Kemudian responden dengan lama bekerja didominasi oleh responden yang bekerja dengan lama 11-20 tahun sebanyak 34 orang (45,95%).

#### 4.2.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan gambaran variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu perencanaan anggaran (X1), pencatatan administratif (X2),

kompetensi sumber daya manusia ( $X_3$ ), lingkungan birokrasi ( $X_4$ ) dan tingkat penyerapan anggaran ( $Y$ ). Berdasarkan hasil kuisioner yang menunjukkan hasil analisis deskriptif dari masing-masing variabel sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tingkat Penyerapan Anggaran	74	19	29	48,36	4,080
Perencanaan Anggaran	74	18	47	35,48	4,024
Pencatatan Administratif	74	16	28	10,95	2,305
Kompetensi SDM	74	21	43	19,47	2,806
Lingkungan Birokrasi	74	24	45	34,50	3,091
Valid N (listwise)	74				

Tabel 4.3 hasil SPSS di atas memperlihatkan deskripsi variabel dalam penelitian ini secara statistic. Minimum adalah nilai terendah dari total nilai pertanyaan setiap variabel, sedangkan Maksimum adalah nilai tertinggi nilai pertanyaan setiap variabel.

1. Perencanaan Anggaran ( $X_1$ )

Perencanaan anggaran memiliki nilai minimum sebesar 18, untuk nilai maksimum sebesar 47, rata-rata nilai dari total pertanyaan adalah 35,48 dengan standar deviasi 4.024.

2. Pencatatan Administratif ( $X_2$ )

Pencatatan Administratif memiliki nilai minimum sebesar 16, untuk nilai maksimum sebesar 28, rata-rata nilai dari total pertanyaan adalah 10,95 dengan standar deviasi 2.305.

3. Kompetensi SDM ( $X_3$ )

Kompetensi SDM memiliki nilai minimum sebesar 21, untuk nilai maksimum sebesar 43, rata-rata nilai dari total pertanyaan adalah 19,47 dengan standar deviasi 2.806.

#### 4. Lingkungan Birokrasi ( $X_4$ )

Lingkungan birokrasi memiliki nilai minimum sebesar 24, untuk nilai maksimum sebesar 45, rata-rata nilai dari total pertanyaan adalah 34,50 dengan standar deviasi 3.091.

#### 5. Tingkat Penyerapan Anggaran (Y)

Tingkat penyerapan anggaran memiliki nilai minimum sebesar 19, untuk nilai maksimum sebesar 29, rata-rata nilai dari total pertanyaan adalah 48,36 dengan standar deviasi 4.080.

### 4.2.3 Uji Kualitas Data

Penelitian terdiri dari 5 variabel yang terdiri dari masing-masing 1 variabel dependen dan 4 variabel independen. Pada masing-masing variabel terdapat sejumlah butir pertanyaan yang berbeda. Butir-butir pertanyaan tersebut melalui prose pengujian validitas dan reliabilitas untuk melihat kelayakan setiap item pertanyaan dengan hasil sebagai berikut:

#### a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur validnya suatu kuesioner dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel. Pengujian validitas dengan menggunakan korelasi bivariate. Berikut adalah tabel hasil pengujian validitas:

**Tabel 4.4**

#### Uji Validitas Variabel Perencanaan Anggaran ( $X_1$ )

No	Item	Pearson Corelation ( $r$ hitung)	Koefisien Korelasi ( $r$ tabel)	Ket
1	X1.1	0.462	0.2075	Valid
2	X1.2	0.433	0.2075	Valid
3	X1.3	0.438	0.2075	Valid
4	X1.4	0.383	0.2075	Valid
5	X1.5	0.396	0.2075	Valid
6	X1.6	0.383	0.2075	Valid
7	X1.7	0.438	0.2075	Valid
8	X1.8	0.435	0.2075	Valid

9	X1.9	0.455	0.2075	Valid
10	X1.10	0.417	0.2075	Valid

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021

Pada tabel 4.4 uji validitas data variabel perencanaan anggaran terdapat 10 butir pernyataan. Seluruh butir pernyataan dinyatakan valid dan bisa dimasukkan dalam uji reliabilitas, normalitas dan hipotesis.

**Tabel 4.5**  
**Uji Validitas Variabel Pencatatan Administratif (X<sub>2</sub>)**

No	Item	Pearson Corelation (r hitung)	Koefisien Korelasi (r tabel)	Ket
1	X2.1	0.773	0.2075	Valid
2	X2.2	0.771	0.2075	Valid
3	X2.3	0.566	0.2075	Valid
4	X2.4	0.428	0.2075	Valid
5	X2.5	0.504	0.2075	Valid
6	X2.6	0.449	0.2075	Valid

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021

Pada tabel 4.7 uji validitas data variabel pencatatan administratif terdapat 6 butir pernyataan. Seluruh butir pernyataan dinyatakan valid dan bisa dimasukkan dalam uji reliabilitas, normalitas dan hipotesis.

**Tabel 4.6**  
**Uji Validitas Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X<sub>3</sub>)**

No	Item	Pearson Corelation (r hitung)	Koefisien Korelasi (r tabel)	Ket
1	X3.1	0.797	0.2075	Valid
2	X3.2	0.558	0.2075	Valid
3	X3.3	0.654	0.2075	Valid
4	X3.4	0.742	0.2075	Valid
5	X3.5	0.778	0.2075	Valid
6	X3.6	0.628	0.2075	Valid
7	X3.7	0.449	0.2075	Valid
8	X3.8	0.566	0.2075	Valid
9	X3.9	0.438	0.2075	Valid

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021

Pada tabel 4.6 uji validitas data variabel kompetensi sumber daya manusia terdapat 9 butir pernyataan. Seluruh butir pernyataan dinyatakan valid dan bisa dimasukkan dalam uji reliabilitas, normalitas dan hipotesis.

**Tabel 4.7**  
**Uji Validitas Variabel Lingkungan Birokrasi (X<sub>4</sub>)**

No	Item	Pearson Corelation (r hitung)	Koefisien Korelasi (r tabel)	Ket
1	X4.1	0.763	0.2075	Valid
2	X4.2	0.667	0.2075	Valid
3	X4.3	0.628	0.2075	Valid
4	X4.4	0.592	0.2075	Valid
5	X4.5	0.695	0.2075	Valid
6	X4.6	0.673	0.2075	Valid
7	X4.7	0.764	0.2075	Valid
8	X4.8	0.731	0.2075	Valid
9	X4.9	0.792	0.2075	Valid

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021

Pada tabel 4.7 uji validitas data variabel lingkungan birokrasi terdapat 9 butir pernyataan. Seluruh butir pernyataan dinyatakan valid dan bisa dimasukkan dalam uji reliabilitas, normalitas dan hipotesis.

**Tabel 4.8**  
**Uji Validitas Variabel Tingkat Penyerapan Anggaran (Y)**

No	Item	Pearson Corelation (r hitung)	Koefisien Korelasi (r tabel)	Ket
1	Y.1	0.763	0.2075	Valid
2	Y.2	0.667	0.2075	Valid
3	Y.3	0.628	0.2075	Valid
4	Y.4	0.592	0.2075	Valid
5	Y.5	0.695	0.2075	Valid
6	Y.6	0.673	0.2075	Valid

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021

Pada tabel 4.8 uji validitas data variabel tingkat penyerapan anggaran terdapat 6 butir pernyataan. Seluruh butir pernyataan dinyatakan valid dan bisa dimasukkan dalam uji reliabilitas, normalitas dan hipotesis.

## b. Uji Reliabilitas

Suatu kuisioner dikatakan *reliable* (andal) jika jawaban seseorang terhadap pernyataan yang ada dalam kuisioner tersebut adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk menentukan keandalan suatu pernyataan digunakan program computer SPSS 20 for windows, hingga diperoleh nilai *Cronbach Alpha* untuk tiap variabel penelitian. Hasil dari uji dapat dikatakan *reliable* apabila *cronbach alpha*  $> 0,6$ . Hasil uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Kriteria	Keterangan
Perencanaan Anggaran ( $X_1$ )	0,712	0,600	Reliabel
Pencatatan Administratif ( $X_2$ )	0,893	0,600	Reliabel
Kompetensi SDM ( $X_3$ )	0,801	0,600	Reliabel
Lingkungan Birokrasi ( $X_4$ )	0,795	0,600	Reliabel
Tingkat Penyerapan Anggaran (Y)	0,842	0,600	Reliabel

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2021

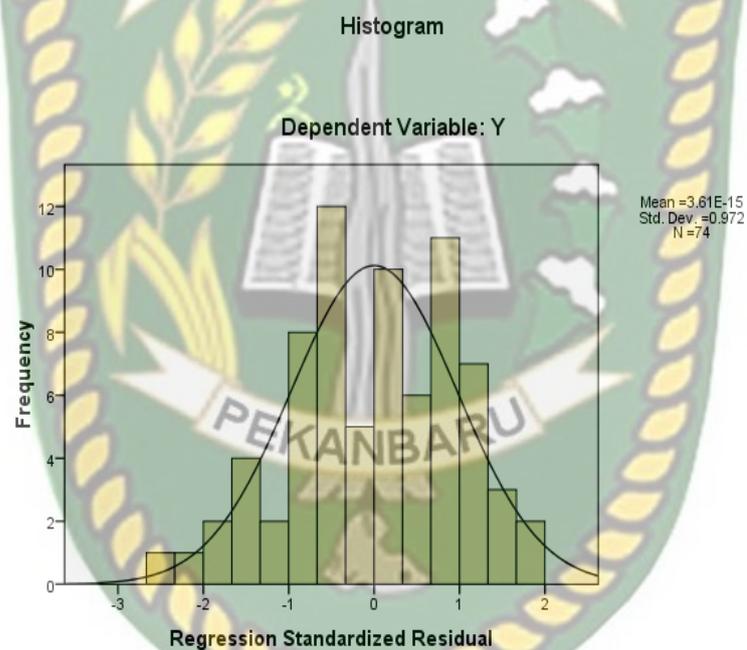
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai *cronbach alpha* dari variabel X (Perencanaan Anggaran, Pencatatan Administratif, Kompetensi SDM, Lingkungan Birokrasi, desentralisasi) dan variabel Y (Tingkat Penyerapan Anggaran) lebih besar dari 0,600 sehingga dapat disimpulkan variabel *reliable* yang berarti bahwa kuisioner sudah dapat digunakan dalam penelitian.

### 4.2.4 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, data residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, ada dua cara untuk mendeteksinya, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik merupakan cara yang termudah untuk melihat normalitas

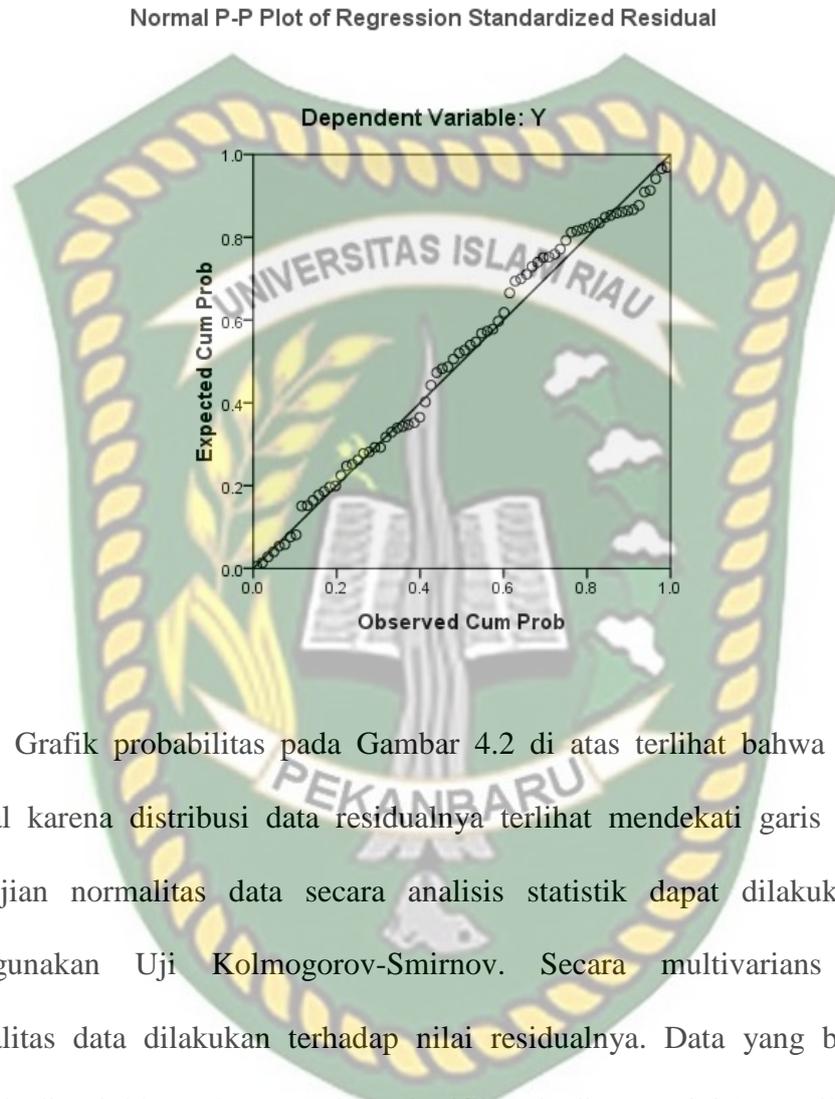
residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Dari Gambar 4.1 terlihat bahwa pola distribusi belum mendekati normal, akan tetapi jika kesimpulan normal tidaknya data hanya dilihat dari grafik histogram, maka hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil.

**Gambar 4.1**  
**Grafik Histogram**



Metode lain yang digunakan dalam analisis grafik adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang akan menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

Gambar 4.2  
Normal Probability Plot



Grafik probabilitas pada Gambar 4.2 di atas terlihat bahwa data sudah normal karena distribusi data residualnya terlihat mendekati garis normalnya. Pengujian normalitas data secara analisis statistik dapat dilakukan dengan menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov. Secara multivarians pengujian normalitas data dilakukan terhadap nilai residualnya. Data yang berdistribusi normal ditunjukkan dengan nilai signifikansi di atas 0,05. Hasil pengujian normalitas pada pengujian terhadap 74 data terlihat dalam Tabel 4.10 berikut:

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		X1	X2	X3	X4	Y
N		74	74	74	74	74
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	16.8649	15.1622	12.0946	17.9865	25.3784
	Std. Deviation	2.89224	4.99596	2.00116	1.80936	4.51695
Most Extreme Differences	Absolute	.180	.185	.161	.165	.110
	Positive	.122	.166	.088	.092	.083
	Negative	-.180	-.185	-.161	-.165	-.110
Kolmogorov-Smirnov Z		1.546	1.591	1.385	1.421	.945
Asymp. Sig. (2-tailed)		.017	.013	.038	.044	.326
a. Test distribution is Normal.						

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.10 di atas, menunjukkan bahwa data terdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Kolmogorov-Smirnov variabel kinerja adalah 0,945 dan signifikansi pada 0,326 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti data residual terdistribusi secara normal, karena nilai signifikansinya besar dari 0,05.

#### 4.2.5 Hasil Uji Asumsi Klasik

Berikut akan disajikan hasil pengujian asumsi klasik terhadap model regresi, yang meliputi uji normalitas data, multikolinearitas, autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Pengujian asumsi klasik di dalam regresi berganda merupakan suatu keharusan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas yang digunakan dalam penelitian. Secara keseluruhan, pengujian ini akan menyimpulkan apakah antar variabel bebas memiliki korelasi atau tidak dengan

sesama variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat penyerapan anggaran (Y) sedangkan variabel independen meliputi perencanaan anggaran ( $X_1$ ), pencatatan administratif ( $X_2$ ), kompetensi SDM ( $X_3$ ) dan lingkungan birokrasi ( $X_4$ ).

#### a. Hasil Uji Multikolonieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*). Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Dalam penelitian ini menggunakan persamaan regresi tingkat penyerapan anggaran = f (perencanaan anggaran, pencatatan administratif, kompetensi SDM dan lingkungan birokrasi).

Untuk mengetahui apakah terjadi multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF yang terdapat pada masing-masing variabel seperti terlihat pada Tabel 4.11 berikut:

Tabel 4.11  
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
X1	.586	1.707
X2	.973	1.028
X3	.624	1.604
X4	.909	1.100

a. Dependent Variable: Y

Suatu model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas adalah jika mempunyai nilai Tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10.

Dari tabel tersebut diperoleh bahwa masing-masing variabel bebas memiliki nilai Tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih besar dari 10. Dengan demikian dalam model ini tidak ada masalah multikolinieritas.

### b. Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1(sebelumnya). Menurut Ghazali, 2006, model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi kita harus melihat nilai uji D-W dengan ketentuan sbb:

Tabel 4.12  
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.827 <sup>a</sup>	.683	.621	1.17486	1.883

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

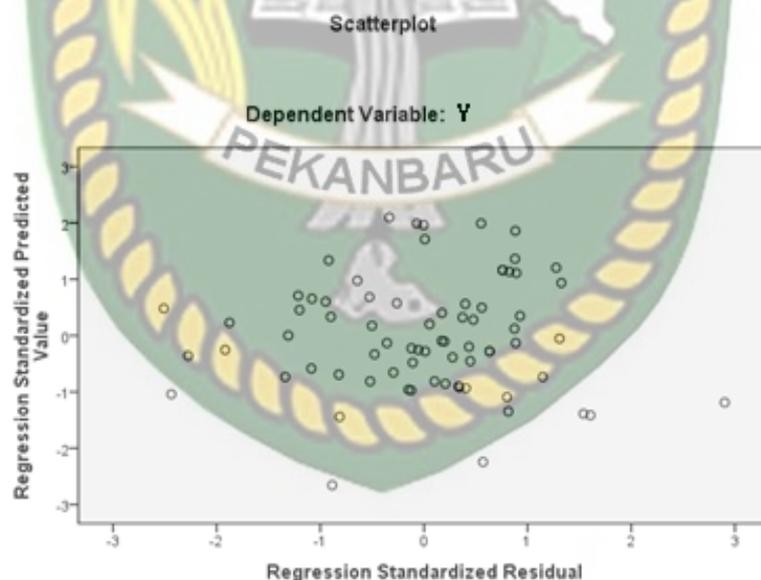
Berdasarkan Tabel 4.12 tersebut menunjukkan bahwa Durbin-Watson berada di daerah tidak terjadi autokorelasi atau tidak karena nilai DW diketahui sebesar 1,883 sesuai dengan ketentuan jika  $1,65 < DW < 2,35$ .

### c. Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda akan disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas.

Untuk menentukan heteroskedastisitas dapat menggunakan grafik scatterplot, titik-titik yang terbentuk harus menyebar secara acak, tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, bila kondisi ini terpenuhi maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan model regresi layak digunakan. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik *scatterplot* yang di tunjukan pada Gambar 4.3 diketahui bahwa koefisien parameter untuk semua variabel independen yang digunakan dalam penelitian tidak ada yang signifikan pada tingkat 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam persamaan regresi yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 4.3  
Grafik *Scatterplot*



#### 4.2.6 Hasil Analisis Regresi Berganda

Adapun persamaan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan pada penelitian ini adalah sebagai berikut  $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$ .

Berikut hasil analisis regresi berganda yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 4.4 dibawah ini.

Tabel 4.13  
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.520	10.943		6.810	.000
	X1	.028	.014	.247	3.021	.007
	X2	.133	.130	.175	2.100	.005
	X3	.421	.310	.166	2.359	.018
	X4	.269	.145	.227	3.856	.027

a. Dependent Variable: Y

Hasil persamaan regresi berdasarkan tabel di atas adalah sebagai berikut:

$$Y = 14.520 + 0.028X_1 + 0.133X_2 + 0.421X_3 + 0.269X_4 + e$$

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Dari model persamaan regresi pada tabel 4.13 dapat dijelaskan bahwa:

1. Nilai konstanta yang terbentuk adalah 14.520. Hal ini menunjukkan bahwa jika nilai perencanaan anggaran, pencatatan administratif, kompetensi SDM dan lingkungan birokrasi dianggap nol maka tingkat penyerapan anggaran sebesar 14.520.
2. Variabel independen pertama yang digunakan dalam model penelitian ini adalah perencanaan anggaran. Dari tahapan pengujian diketahui bahwa variabel perencanaan anggaran memiliki arah dan slop koefisien regresi sebesar 0.028 yang berarti jika diasumsikan perencanaan anggaran meningkat 1 satuan dan variabel lainnya dianggap konstan, maka tingkat penyerapan anggaran meningkat sebesar 0.028.

3. Variabel independen kedua yang digunakan dalam model penelitian ini adalah pencatatan administratif. Dari tahapan pengujian diketahui bahwa variabel pencatatan administratif memiliki arah dan slop koefisien regresi sebesar 0.133 yang berarti jika diasumsikan pencatatan administratif meningkat 1 satuan dan variabel lainnya dianggap konstan, maka tingkat penyerapan anggaran meningkat sebesar 0.133.
4. Variabel independen ketiga yang digunakan dalam model penelitian ini adalah kompetensi SDM. Dari tahapan pengujian diketahui bahwa variabel kompetensi SDM memiliki arah dan slop koefisien regresi sebesar 0.421 yang berarti jika diasumsikan kompetensi SDM meningkat 1 satuan dan variabel lainnya dianggap konstan, maka tingkat penyerapan anggaran meningkat sebesar 0.421.
5. Variabel independen keempat yang digunakan dalam model penelitian ini adalah lingkungan birokrasi. Dari tahapan pengujian diketahui bahwa variabel lingkungan birokrasi memiliki arah dan slop koefisien regresi sebesar 0.269 yang berarti jika diasumsikan lingkungan birokrasi meningkat 1 satuan dan variabel lainnya dianggap konstan, maka tingkat penyerapan anggaran meningkat sebesar 0.269.

#### 4.2.7 Uji Hipotesis

##### a. Uji t

Berdasarkan Tabel 4.13 maka dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut:

1. Hasil uji hipotesis perencanaan anggaran terhadap tingkat penyerapan anggaran diketahui nilai  $t_{hitung} = 3,021$  dengan  $t_{tabel} = 1,993$ . Jadi  $t_{hitung} > t_{tabel}$  sehingga dapat disimpulkan perencanaan anggaran berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran. Demikian pula diperoleh nilai signifikan sebesar  $0,007 < 0,05$  yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan. Kesimpulan  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak.
2. Hasil uji hipotesis pencatatan administratif terhadap tingkat penyerapan anggaran diketahui nilai  $t_{hitung} = 2,100$  dengan  $t_{tabel} = 1,993$ . Jadi  $t_{hitung} > t_{tabel}$  sehingga dapat disimpulkan pencatatan administratif berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran. Demikian pula diperoleh nilai signifikan sebesar  $0,005 < 0,05$  yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan. Kesimpulan  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak.
3. Hasil uji hipotesis kompetensi SDM terhadap tingkat penyerapan anggaran diketahui nilai  $t_{hitung} = 2,359$  dengan  $t_{tabel} = 1,993$ . Jadi  $t_{hitung} > t_{tabel}$  sehingga dapat disimpulkan kompetensi SDM berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran. Demikian pula diperoleh nilai signifikan sebesar  $0,018 < 0,05$  yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan. Kesimpulan  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak.
4. Hasil uji hipotesis lingkungan birokrasi terhadap tingkat penyerapan anggaran diketahui nilai  $t_{hitung} = 3,856$  dengan  $t_{tabel} = 1,993$ . Jadi  $t_{hitung} > t_{tabel}$  sehingga dapat disimpulkan lingkungan birokrasi berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran. Demikian pula diperoleh nilai signifikan sebesar  $0,027 <$

0,05 yang berarti terdapat pengaruh yang disignifikan. Kesimpulan  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak.

#### b. Uji F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependennya. Berdasarkan Tabel 4.14 diketahui bahwa nilai  $F_{hitung} = 9,714$  dan  $F_{tabel} = 2,505$  sehingga  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$  dan nilai signifikansi  $F_{hitung}$  adalah 0,000 lebih kecil dari nilai  $\alpha$  0,05. Keputusan yang diambil adalah  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Diterimanya hipotesis alternatif menunjukkan variabel bebas yang terdiri dari perencanaan anggaran, pencatatan administratif, kompetensi SDM dan lingkungan birokrasi mampu menjelaskan keragaman dari variabel terikat yaitu tingkat penyerapan anggaran atau dengan kata lain perencanaan anggaran, pencatatan administratif, kompetensi SDM dan lingkungan birokrasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran. Hasil perhitungan Uji F ini dapat dilihat pada Tabel 4.14 berikut:

Tabel 4.14 Hasil Perhitungan Uji F

#### ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7681.947	4	2560.649	9.714	.000 <sup>a</sup>
	Residual	17194.241	69	212.275		
	Total	24876.188	73			

a. Predictors: (Constant), X4, X1, X3

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Olahan, 2021

#### 4.2.8 Hasil Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai  $R^2$  yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang butuh untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi. Koefisien determinasi dapat tabel 4.15 berikut ini:

Tabel 4.15  
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.827 <sup>a</sup>	.683	.621	1.17486

a. Predictors: (Constant), X1

b. Dependent Variable: Y

Dari analisis di atas dapat dilihat bahwa variabel X (perencanaan anggaran, pencatatan administratif, kompetensi SDM dan lingkungan birokrasi) mempunyai pengaruh terhadap variabel Y (tingkat penyerapan anggaran) sebesar 68,3% sedangkan sisanya sebesar 31,7% dipengaruhi oleh faktor lain seperti sistem pengendalian, ketepatan skedul penyusunan anggaran dan lain sebagainya yang tidak penulis teliti.

### 4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Pada bagian ini dikemukakan pembahasan yang merupakan pengujian hipotesis terhadap hasil penelitian. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan program SPSS, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

#### 4.3.1 Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran

Hasil pengujian hipotesis pertama dapat disimpulkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Siak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jumriani 2018 yang menyatakan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan semakin baik perencanaan anggaran maka akan menghasilkan ketepatan dalam penyerapan anggaran.

Perencanaan merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Perencanaan menentukan semua aktivitas yang perlu dan akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Teori penetapan tujuan (*goal setting theory*) menjabarkan bahwa penetapan sasaran yang didukung oleh komitmen dapat mempermudah tercapainya tujuan/sasaran. Penetapan sasaran program yang tepat melalui perencanaan yang optimal dapat mempermudah pelaksanaan kegiatan.

Setiap organisasi yang telah menetapkan sasaran (*goal*) yang diformulasikan ke dalam rencana anggaran lebih mudah untuk mencapai target kinerjanya sesuai

dengan visi dan misi organisasi itu sendiri. Sebuah anggaran tidak hanya sekedar mengandung rencana dan jumlah nominal yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan/program, tetapi juga mengandung sasaran yang ingin dicapai organisasi.

#### **4.3.2 Pengaruh Pencatatan Administratif terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran**

Hasil pengujian hipotesis kedua dapat disimpulkan bahwa pencatatan administratif berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Siak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanuriza 2019 yang menyatakan bahwa pencatatan administrasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dalam kegiatan Safeguard dari benda vital di Satker Kepolisian Daerah Riau. Hal ini menunjukkan semakin baik pencatatan administratif yang dilakukan maka akan menghasilkan ketepatan dalam penyerapan anggaran.

Administrasi dapat dikatakan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan. Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa administrasi menjadi salah satu bagian dari proses pembangunan, karena kegiatan yang dilakukan tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap pembangunan daerah yang disusun dalam sistem pemerintahan. Jika bagian administrasi dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka hasil dari proses dalam pencapaian tujuan pun dapat tercapai. Administrasi juga dapat dikatakan sebagai penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis baik internal maupun eksternal dengan maksud menyediakan keterangan.

### **4.3.3 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran**

Hasil pengujian hipotesis ketiga dapat disimpulkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Siak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardana 2016 yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran pada SKPD Kabupaten Jembrana. Hal ini menunjukkan semakin baik kompetensi sumber daya manusia maka akan menghasilkan ketepatan dalam penyerapan anggaran.

Salah satu faktor utama yang menentukan baik atau tidak jalannya roda pemerintahan ini adalah sumber daya manusia. Hal ini terlihat dari bagaimana manusia sebagai tenaga kerja menggunakan potensi fisik dan psikis yang ia miliki secara maksimal dalam mencapai tujuan organisasi (lembaga). Fungsi pemerintah sebagai SDM dapat diwujudkan dalam prakteknya melalui kegiatan pemerintah sebagai pengelola keuangan negara dalam penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

### **4.3.4 Pengaruh Lingkungan Birokrasi terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran**

Hasil pengujian hipotesis keempat dapat disimpulkan bahwa lingkungan birokrasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Siak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bramastyasa 2019 yang menunjukkan bahwa lingkungan birokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan

anggaran. Hal ini menunjukkan semakin baik lingkungan dalam birokrasi akan menghasilkan ketepatan dalam penyerapan anggaran.

Dalam perspektif teori institusional, organisasi sektor publik dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya seharusnya berperan sebagai unit analisis yang meyakinkan publik atas segala tindakan yang dilakukan oleh pegawai public dalam memaksimalkan penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Dalam hal ini dijelaskan bahwa unit analisis dalam teori institusional adalah organization field yaitu sekelompok organisasi yang secara keseluruhan membentuk suatu kehidupan institusional seperti pemasok utama, pelanggan, regulator atau pesaing Darono, 2013.

Jika suatu kehidupan institusional dalam organisasi sektor publik, baik sebagai pemasok utama, pelanggan, regulator atau pesaing berjalan seirama dengan aspek-aspek sosial dan hukum, tekanan maupun kepentingan konstituen tidak akan mempengaruhi pegawai publik dalam memaksimalkan penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Lingkungan birokrasi yang baik akan membuat pelaksanaan kegiatan operasional menjadi lancar. Namun jika lingkungan birokrasi tidak mendukung kegiatan organisasi maka akan menghambat kinerja organisasi.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan tentang pengaruh perencanaan anggaran, pencatatan administratif, kompetensi SDM dan lingkungan birokrasi terhadap tingkat penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Siak, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Siak.
2. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pencatatan administratif berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Siak.
3. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Siak.
4. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa lingkungan birokrasi berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Siak.
5. Hasil penelitian membuktikan bahwa perencanaan anggaran, pencatatan administratif, kompetensi SDM dan lingkungan birokrasi berpengaruh terhadap

tingkat penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Siak.

## 5.2 Saran

Saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi kesempurnaan penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran dan referensi bagi akademis yang ingin mempelajari dan memahami tentang hal-hal yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada pemerintah daerah.
2. Bagi instansi yang dalam hal ini organisasi perangkat daerah Kabupaten perlu meningkatkan pemahaman akan pentingnya perencanaan anggaran, pencatatan administratif, kompetensi sumber daya manusia dan lingkungan birokrasi yang dilaksanakan sehingga mampu mendukung penyerapan anggaran di daerah.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi variabel tingkat penyerapan anggaran di daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfebriano. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Slack* Anggaran pada PT. BRI di Kota Jambi. *e-Jurnal Binar Akuntansi*, Vol. 2 No. 1. Jambi: Fakultas Ekonomi Universitas Jambi.
- Amelia, Feni. 2014. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Dengan Ketidak Patian Lingkungan dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Pada Perbankan Swasta di Pekanbaru. *JOM FEKON*. Vol. 1 No. 2 Oktober 2014.
- Anthony, N. Robert dan Govindarajan, Vijay. 2016. Sistem Pengendalian Manajemen. Jilid 2. Tangerang: Karisma Publishing Group.
- Apriyandi. 2016. "Pengaruh Informasi Asimetri terhadap Hubungan Antara Anggaran Partisipatif dan *Budgetary Slack* pada pemerintahan Kabupate Wejo Makasar. *Simposium Nasional Akuntansi VI*. Makasar.
- Arikunto, S. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ayuni, Ni Made Kusuma. 2018. Pengaruh Asimetri Informasi Pada Senjangan Anggaran Dengan Kejelasan Sasaran Anggaran dan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 22.1. Januari (2018): 492-520.
- Aldita, 2018. "Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Bastian. Indra. 2016. *Audit Sektor Publik*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Christina, Vitha, 2013, Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Dengan Ketidakpastian Lingkungan Sebagai Variabel Moderating Pada PT Perusahaan Gas Negara (PERSERO) TBK, Jawa Bagian Barat. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara.
- Dewi, Ni Luh Putu S. dan Gerianta W. Y. 2013. Analisis Pengaruh Anggaran Partisipatif pada *Budgetary Slack* dengan Empat Variabel Moderasi (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Badung, Bali). *Jurnal*. Bali: Universitas Udayana.
- Garrison, Ray H, Norren, Brewer. 2013. *Akuntansi Manajerial*. Jakarta: Salemba Empat.

- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hansen dan Mowen. 2012. Akuntansi Manajerial Buku 1 Edisi 8, Salemba Empat, Jakarta.
- Huseno, Tun. 2017. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Komitmen Organisasi Dan Ketidakpastian Lingkungan terhadap Senjangan Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik*. Vol. 1 No. 1 Tahun 2017. Program Studi Keuangan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sumatera Barat.
- Ikhsan, A. dan Ishak, M. 2014. Akuntansi Keperilakuan: Tinjauan Terhadap Ilmu Keperilakuan. Editor Krista. Penerbit Salemba Empat.
- Irmayanti, Fransiska Dian. 2016. Pengaruh Corporate Governance Dan Pengungkapan Sukarela terhadap Asimetri Informasi Selama Krisis Finansial Global (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Fitra, Iham. 2017. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Anggaran Dan Komitem Organisasi Terhadap Budgetary Slack (Studi Empiris pada SKPD Kota Payakumbuh). *Artikel*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang.
- Lestari, Ni Komang Linda. 2017. Pengaruh Pengendalian Internal, Integritas Dan Asimetri Informasi Pada Kecurangan Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol 21.1 Oktober (2017): 389-417. ISSN: 2302-8556.
- Luhur, Ida Bagus Surya Cahyadi. (2019). Pengaruh Partisipasi Penganggaran, Informasi Asimetri, Komitmen Organisasi, dan Ketidakpastian Lingkungan pada Senjangan Anggaran. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. ISSN: 2302-8556 . Vol.26.2. Februari (2019): 966-996.
- Luthans, Fred. 2014. Perilaku Organisasi, (Alih Bahasa V.A Yuwono, dkk), Edisi Bahasa Indonesia, Yogyakarta.
- Nafarin, M. 2012. Penganggaran Perusahaan. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Marfuah. 2014. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Dengan Menggunakan Komitmen Organisasi dan Informasi Asimetri Sebagai Variabel Pemoderasi. *EKBISI*. Vol. VIII, No. 2 Juni 2014, hal. 200-218. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

- Mukaromah, Aliati. 2015. Pengaruh Partisipasi Penganggaran, Asimetri Informasi, Komitmen Organisasi, Ambiguitas Peran Terhadap *Budgetary Slack*
- Mifta, T, 2016. Birokrasi Dan Dinamika Kekuasaan. Kencana, Jakarta
- Pertiwi, Bekti. 2015. Implikasi Asimetri Informasi, Kompensasi Manajerial, Perjanjian Kredit Dan Biaya Politik Terhadap Praktik Manajemen Laba (Perusahaan Manufaktur Terdaftar Di BEI Periode 2014-2013). *Skripsi*. Universitas Lampung.
- Perwani, Ratih. 2013. Pengaruh Asimetri, Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Senjangan (Studi Kasus Pada PT. Angkas Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang). *Naskah Publikasi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Prakoso, Romadhon Wahyu. 2016. Analisis Pengaruh Partisipasi Anggaran, Informasi Asimetri, Komitmen organisasi, dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Senjangan Anggaran (Studi Kasus pada SKPD kota Semarang). *Skripsi*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Rahman, Firdaus A. 2013. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Universitas Islam Riau. Vol. 15 No. 1 Juni 2013.
- Risa, Nurma. 2014. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Komitmen Organisasi terhadap Senjangan Anggaran (Studi Kasus Pada Unisma Bekasi). *JRAK* Vol 5, No 2 Agustus 2014.
- Robbins, Stephen P. & A. Judge, Timothy. 2016. *Organizational Behavior. Fourteenth Edition*. Pearson education. New Jersey 07458. 77-89.
- Santoso, Singgih, 2014. Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik, PT Elex Media Komputindo, Jakarta. Sopiah. 2016. Perilaku Organisasi. Yogyakarta. CV. Andi Offset.
- Sembiring, 2017. Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karyawan. Edisi pertama Cetakan kelima. Yogyakarta: BPF.
- Sutrisno 2013. Pengaruh Pengendalian Internal, *Good Corporate Governance* dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Perusahaan. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Sopiah. 2016. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta. CV. Andi Offset.

Utama, Ekja Yudha. 2013. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial: Komitmen Organisasi dan Persepsi Inovasi sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Satuan Kerja Instansi Vertikal Wilayah Pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sampit). *Diponegoro Journal of Accounting*, Volumr 2, Nomor 3, Tahun 2013.

Wicaksono, Tri. 2016. Analisis Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris, Karakteristik Komite Audit, Dan Struktur Kepemilikan Manajerial Terhadap Praktik *Real Earning Management*. *Jurnal Al-Iqtishad*. Edisi 12 Volume I Tahun 2016. Fakultas Ekonomi dan Sosial. Universitas Sultan Syarif Kasim. Pekanbaru.

